

**LANDASAN HISTORIS PERJUANGAN HASAN TIRO
DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KOMBATAN GAM
(Studi Pada Kombatan GAM di Wilayah Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

BAYU SETIAWAN

NIM. 200501051

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM/BANDA ACEH
1446 H/2024 M**

**LANDASAN HISTORIS PERJUANGAN HASAN TIRO DI ACEH DALAM
PERSPEKTIF KOMBATAN GAM
(Studi Pada Kombatan GAM di Wilayah Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Islam Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana S-1 dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan oleh:

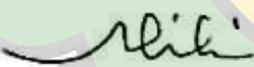
BAYU SETIAWAN
NIM. 200501051

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Misri A Muchsin, M.Ag
NIP. 196303021994031001


Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA
NIP. 197301072006041001


جامعة الرانيري
Disetujui Oleh Ketua Prodi SKI
AR - RANIRY


Hermansyah, M. Th., MA, Hum
NIP. 198005052009011021

**LANDASAN HISTORIS PERJUANGAN HASAN TIRO
DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KOMBATAN GAM
(Studi Pada Kombatan GAM di Wilayah Pidie)**

SKRISPI

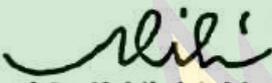
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) di Program Studi Sejarah dan
Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat 26 Juli 2024
Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

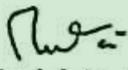

Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag.
NIP. 196303021994031001


Dr. Ajidar Mutsyah, Lc., MA
NIP. 197301072006041001

Penguji I

Penguji II


Asmanidar, S.Ag., M.A.
NIP. 19771231200702001


Marduaty, S.Ag., M.A.
NIP. 197310162006042002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Setiawan
NIM : 200501051
Jenjang : Sarjana (S1)
Jurusan/prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa karya dengan judul "Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh Dalam Perspektif Kombatan GAM (Studi Kombatan GAM di Wilayah Pidie)" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Pendapat atau temuan orang lain skripsi ini dikutip dan telah dicantumkan sumber referensi. Bila ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 26 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Bayu Setiawan

ABSTRAK

Nama : Bayu Setiawan
NIM : 200501051
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/ Sejarah Kebudayaan Islam
Judul : Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh Dalam Perspektif Kombatan GAM (Studi Pada Kombatan di Wilayah Pidie)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2024
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pemimbing I : Prof. H. Dr. Misri A Muchsin, M.Ag,
Pemimbing II : Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA,

Kata Kunci: *Landasan, Historis, Perjuangan Hasan Tiro, Aceh.*

Skripsi ini berjudul “**Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh Dalam Perspektif Kombatan GAM (Studi Pada Kombatan GAM di Wilayah Pidie)**”.

Perjuangan Hasan Tiro merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia, khususnya di Aceh. Hasan Tiro, seorang tokoh kharismatik dan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memulai perjuangannya pada akhir tahun 1970-an dengan tujuan mendirikan negara merdeka di Aceh, terlepas dari Indonesia. Perjuangan ini berujung pada perjanjian damai Helsinki tahun 2005, yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh dan mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan biografi singkat Hasan Tiro, menjelaskan landasan historis perjuangan Hasan Tiro di Aceh dan menganalisis perspektif kombatan GAM di wilayah Pidie terhadap perjuangan Hasan Tiro. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan biografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Literatur (Perpustakaan), dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasan Tiro adalah putra kelahiran Pidie, Aceh. Pada tanggal 25 September 1925 tepatnya di Kampung Tanjong Bungong Lameulo. Hasan Tiro pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar negeri sebelum kembali ke Aceh pada tahun 2008 setelah perdamaian tercapai. Landasan dari perjuangan Hasan Tiro adalah *illegal transfer osafarity* atau transfer kedaulatan yang ilegal yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Sehingga membuat Hasan Tiro memprotes dan berjuang dengan membangkitkan kembali kemerdekaan Aceh dengan tujuan meneruskan kerajaan yang lama (*successor state*). Selain itu, dalam perspektif kombatan GAM di wilayah Pidie pelanggaran HAM dan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh menjadi pemicu kemarahan Hasan Tiro dan pengikutnya sehingga menyatakan perlawanan terhadap RI yang dilangsungkan di gunung Halimun, Pidie. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perjuangan Hasan Tiro adalah mencapai kemerdekaan penuh bagi Aceh dari Indonesia. Hasan Tiro berjuang untuk mendirikan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka yang terpisah dari Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Wasyukurillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan iman. Shalawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan hingga sampai ke alam yang penuh kenikmatan dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan kepada alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama muta'akhirin yang masih ada di atas permukaan bumi Allah Swt sebagai lampu penerang membawa agama islam kepada masyarakat yang awam.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh Dalam Perspektif Kombatan GAM (Studi Pada Kombatan GAM Di Wilayah Pidie)”. Penulis menyadari penulisan tugas akhir ini tidak berhasil tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan kepada penulis dan juga bantuan berbagai pihak, dalam hal ini banyak dorongan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

Bapak Syarifuddin, M. Ag., ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kepada Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Bapak Hermansyah, M. Th., Ma beserta

stafnya, dan seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Bapak Prof. Dr. Misri A Muchsin, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta M. Syafi'i serta ibunda tercinta Azizah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada saudara laki-laki Ahmad Sayuti yang telah sabar dan sangat pengertian menunggu proses sampai Skripsi ini selesai.

Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan keluarga mahasiswa SKI angkatan 20 yang telah berjuang sama-sama dan menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga sukses untuk semuanya.

Kepada pemilik nama Nola Ervina terima kasih sudah menjadi sosok yang sudah bertahan dalam perjalanan ini. Semoga dimudahkan segala urusan dan meraih impian yang di cita-citakan.

Kepada sahabat semeja, Rahmad Fuadi, Afdhalul Rijaln (Pak Cek), Abdul Harrys, Abdul Goemary, Muslim, Budi Irman, Rahmad Furqan, T. Alvin Muharrier, Iswandi, Shafa Habib Syahnelo, dan AlFahran, terima kasih atas waktu

yang sangat singkat dan menguras pikiran dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah selalu ada dalam waktu sulit ataupun senang.

Banda Aceh, Agustus 2024
Penulis,

Bayu Setiawan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah	6
1.6 Kajian Pustaka	8
1.7 Metode Penelitian	12
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB II: KARANGKA TEORI	18
2.1 Teori Fungsional Konflik Lewis A. Coser.....	18
2.2 Teori Kedaulatan.....	23
BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	26
3.1 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian	26
3.2 Sistem Budaya Masyarakat.....	28
3.3 Gambaran Pendidikan Masyarakat	30
3.4 Mata Pencarian dan Kegiatan Ekonomi.....	30
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Biografi Singkat Hasan Tiro	33
4.2 Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh	38
4.3 Perspektif Kombatan GAM Wilayah Pidie Terhadap Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh	61
BAB V: PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

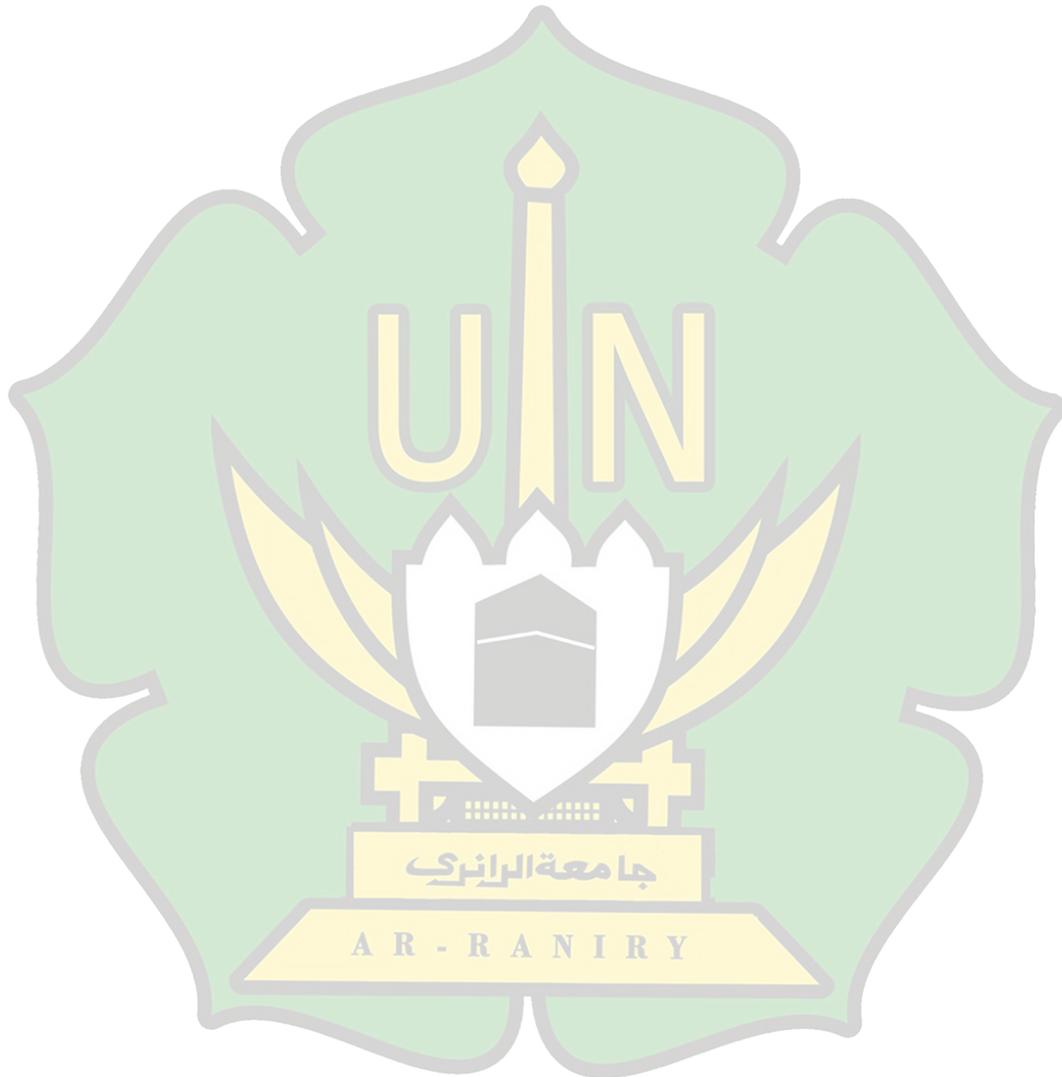
DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Foto-Foto Tgk. M. Hasan di Tiro
- Lampiran II : Foto Kondisi Gunung Halimun di Pidie Sekarang
- Lampiran III : Struktur GAM Periode Awal dan Periode Partai Aceh Sekarang
- Lampiran IV : Daftar Pertanyaan
- Lampiran V : Daftar Informan
- Lampiran VI : Dokumentasi Peneliti dan Informan
- Lampiran VII : Dokumentasi Sidang Munaqasyah Skripsi
- Lampiran VIII: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

3.1. Jumlah Penduduk perdesun Gampong Mns. Mancang.....	28
3.2. Jumlah berbagai jenis pekerjaan Penduduk gampong Mns. Mancang ..	31
4.1. Riwayat Pendidikan Hasan Tiro.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa rakyat Aceh tidak dapat ditaklukkan oleh Belanda dengan cara yang militeristik, karena perang terhadap Belanda dalam pandangan rakyat Aceh merupakan perang suci “*jihad fisabilillah*,” yang bermakna jika mati akan disebut syahid karena didorong oleh semangat Aqidah Islamiyah, yang sudah mengakar sangat kuat dalam pemahaman rakyat Aceh. Oleh karena itu, perang ini telah melibatkan semua lapisan masyarakat tidak terkecuali siapapun bahkan kaum perempuan sekalipun.¹ Sebagian beranggapan bahwa keberadaan Aceh di dalam Indonesia sejalan dengan proses kesejarahan kedua belah pihak, karena menghadapi penindasan yang sama, memiliki nasib yang sama dan oleh karena itu Aceh dan Indonesia pantas untuk membangun cita-cita Nasionalisme bersama.²

Dukungan para ulama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa itu bukan tanpa syarat. Soekarno diminta untuk menandatangani perjanjian untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh. Namun janji yang tak kunjung dipenuhi membuat Tgk Muhammad Daud Beureueh menyatakan bergabung dengan Darul Islam Indonesia. Yang menjadi puncak kekecewaan adalah presiden Soekarno yang berpidato di Amuntai, Kalimantan pada tanggal 27 Januari 1953 menolak Islam sebagai dasar negara, sehingga menjadi satu dalil pemberontakan DI/TII dan

¹ Abrar Muhammad Yus, “Pemikiran Dan Tindakan Politik Hasan Tiro”, *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 54, Mei 2020, hlm. 1

² Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), 2010), hlm. 27.

perlawanan GAM. Mengenai kondisi jakarta seperti disebutkan di atas menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Aceh dimana sebenarnya posisi Aceh di Indonesia, sehingga muncul permintaan rakyat Aceh untuk referendum pada tahun 1999.³

Pemberontakan ini juga memiliki akar yang kuat di dalam perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi begitu cepat di Aceh pada masa Orde Baru. Di satu sisi, eksplorasi sumber daya alam besar-besaran yang tidak mengimbas kepada kesejahteraan rakyat Aceh, telah menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama di daerah pedesaan. Di sisi lain, sentralisasi dan penetrasi birokrasi sipil dan militer dari pusat terhadap Aceh, telah mengeliminasi kekuatan-kekuatan politik lokal yang ada selama ini. Perasaan kecewa akibat diperlakukan pusat dan di tengah-tengah kekosongan kepemimpinan alternatif di Aceh, memberikan peluang kepada Hasan Tiro dan GAM untuk tampil mengartikulasikan identitas politik Aceh.⁴

Muhammad Hasan Tiro lahir di Pidie, Aceh, pada tanggal 25 September 1925 tepatnya di Kampung Tanjong Bungong Lameulo, sekitar 20 km dari Sigli. Hasan Muhammad di Tiro adalah keturunan ketiga dari Tengku Syik Muhammad Saman di Tiro. Muhammad Hasan di Tiro merupakan anak kedua pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Pocut inilah cucu perempuan Tengku Muhammad Saman di Tiro. Karena posisinya sebagai

³ Monika Sari, "Hasan Tiro: History of Aceh as The Foundation of Ideology Independent Aceh", *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol 7, No 1 2022. hlm. 29.

⁴ Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam...*, hlm. 33-34.

keturunan Tengku Saman di Tiro itulah Hasan Muhammad di Tiro dihormati oleh seluruh masyarakat Aceh.

Sikap keras Hasan Muhammad di Tiro dalam menolak konsep negara kesatuan Indonesia merupakan proses pergolakan batin yang berlangsung lama, sebelum berangkat ke Amerika pada tahun 1950. Hasan Muhammad di Tiro merupakan pemuda yang terlibat aktif dalam berbagai organisasi keindonesiaan. Bersama abangnya, Zainul Abidin di Tiro, Hasan Muhammad di Tiro aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Hasan Muhammad di Tiro bahkan pernah menjadi ketua muda PRI di Pidie tahun 1945. Ketika Wakil Perdana Menteri II dijabat Syafruddin Prawiranegara, Hasan Muhammad di Tiro pernah menjadi stafnya. Atas jasa Syafruddin jugalah melalui rekomendasi Tengku Daud Beureueh, Hasan Muhammad di Tiro kuliah pada Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan kemudian mendapat beasiswa Colombo Plan ke Amerika. Sembari menyelesaikan studinya di negeri Amerika Serikat, Hasan Muhammad Di Tiro juga bekerja pada Kedutaan Indonesia. Artinya, pada suatu periode Hasan Muhammad Di Tiro pernah menaruh harapan besar terhadap Indonesia.⁵

Ketidakadilan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh yang membuat Hasan Tiro memimpin kemerdekaan Aceh. Ia merupakan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 di kawasan gunung Halimon Pidie. Hasan Muhammad di Tiro ikut keluar masuk hutan bersama pasukannya sejak 1976 untuk

⁵ Fadhil Ilhamsyah, “Gagasan Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh”, *Jurnal Public Policy*, Vol.4, No.1 April 2018, hlm. 14.

memperjuangkan pemisahan Aceh dari Indonesia. Menurut Hasan Tiro, ratusan tahun sebelum Indonesia terbentuk, Aceh telah menjadi sebuah identitas politik sendiri, yang bukan saja besar dan makmur, tetapi juga diakui dunia internasional. Hasan Tiro beranggapan bahwa Aceh dan sejarahnya tidak dapat terpisahkan dengan Indonesia, menjadikannya bagian dari satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dengan harapan bahwa Indonesia memiliki sejarah bersama menjadi kekuatan dalam perumusan konsepsi sejarah Indonesia. Ia berharap bahwa Islam dan masyarakat yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memerdekakan Indonesia dapat bisa dijadikan sebagai suatu falsafah dan ideologi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, Hasan Tiro bercita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.⁶

Dalam perspektif kombatan GAM menjelaskan bahwa ketidakadilan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh menjadi pemicu kemarahan Hasan Tiro dan pengikutnya sehingga menyatakan perlawanan terhadap RI yang dilangsungkan di gunung Halimun, Pidie. tujuan perjuangan Hasan Tiro untuk mewujudkan negara bersambung (*successor state*) dari Kerajaan Aceh tempo dulu sebagai satu Kerajaan yang pernah ada dalam catatan sejarah negara-negara di dunia.⁷ Hasan Tiro mengatakan bahwa Aceh merupakan sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka, hal ini dinyatakan dalam buku “Atjeh Bak Mata Donja” dan dikutip kembali dalam buku “Konsep Politik Hasan Tiro Dalam Melihat Aceh”. Aceh sebagaimana tertulis dalam sejarahnya merupakan daerah yang kaya akan

⁶ Monika Sari, “Hasan Tiro: History of Aceh...”, hlm. 30.

⁷ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

sumber daya alam. Kekayaan Aceh yang melimpah tersebut, mampu membantu perjuangan Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Sejarah menyebutkan bahwa Aceh merupakan daerah modal untuk Indonesia. Antara lain, tahun 1946, rakyat Aceh menyumbang uang tunai untuk membantu pemerintah Indonesia di Yogyakarta dan membiayai diplomasi Indonesia di internasional. Pada tahun 1949, rakyat Aceh membeli dua pesawat Dakota yang diberi nama Seulawah yang menjadi modal pertama Garuda Indonesia Airways”.⁸

Berdasarkan latar belakang, ingin diteliti lebih mendalam tentang landasan historis perjuangan Hasan Tiro di Aceh dalam perspektif kombatan GAM (studi pada kombatan GAM di wilayah Pidie). Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kembali peristiwa yang sebenarnya terjadi pada masa itu serta menjawab berbagai masalah yang muncul selama perjuangan Hasan Tiro. Dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh Dalam Perspektif Kombatan GAM (Studi Pada Kombatan GAM Di Wilayah Pidie)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka ada beberapa permasalahan yang akan ditekankan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Biografi Singkat Muhammad Hasan di Tiro?
2. Apa Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh?

⁸ Fajarwati, “*Konsep Politik Hasan Tiro Dalam Melihat Aceh*”, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 3-4.

3. Bagaimana Perspektif Kombatan GAM di Wilayah Pidie Terhadap Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Biografi Muhammad Hasan di Tiro.
2. Untuk menjelaskan Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh.
4. Untuk Menganalisis Perspektif Kombatan GAM di Wilayah Pidie Terhadap Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan maupun menambah pengetahuan di bidang sejarah terutama yang berhubungan dengan perjuangan Hasan Tiro. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang tokoh Aceh Khususnya Muhammad Hasan di Tiro.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan wawasan baru bagi pembaca ataupun masyarakat yang ingin mengetahui tentang perjuangan putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Bangsa Aceh yaitu Muhammad Hasan di Tiro.

1.5 Penjelasan Istilah

Judul skripsi ini memiliki arti khusus, penulis akan menjelaskan lebih lanjut sebelum melanjutkan. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan pemahaman umum

tentang masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul dan penulisan, memperjelas istilah-istilah berikut:

1. Landasan

Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak yang berfungsi sebagai dasar pijakan.⁹ Landasan yang dimaksud oleh penulis adalah landasan historis perjuangan Hasan Tiro di Aceh.

2. Historis

Historis adalah berkenaan dengan sejarah, bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau.¹⁰ Memaknai kata historis para sejarawan memiliki pendapat yang beragam, Ernst Bernheim, menyebut historis sebagai ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Dan menurut Hasan, historis atau tarikh adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya, temanya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu.¹¹

3. Landasan Historis

Landasan historis adalah dasar atau fondasi yang bersifat sejarah yang digunakan untuk mendukung atau menjelaskan suatu hal, peristiwa, atau konsep. Landasan historis biasanya merujuk pada fakta-fakta, peristiwa, dan perkembangan

⁹ Abdul Rasid, "Implikasi Landasan-Landasan Pendidikan: The Implication of Educational Foundations", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 3.

¹⁰ *KBBI*

¹¹ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol 17, No 1, Desember 2017, hlm. 129.

yang terjadi di masa lalu yang memiliki relevansi atau pengaruh terhadap situasi atau kondisi saat ini.¹²

4. Perjuangan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perjuangan adalah salah satu wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik; (*Politik*). Menurut Soekanto perjuangan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: pertama, perjuangan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Perjuangan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, perjuangan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, perjuangan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³ Oleh karena itu, Perjuangan yang dimaksud di sini adalah perjuangan Hasan Tiro.

1.6 Kajian Pustaka

Peneliti melakukan tinjauan literatur untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa buku dan jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan politik dan perjuangan Hasan Tiro, seperti "Konsep Politik Hasan Tiro Dalam Melihat Aceh" yang ditulis oleh

¹² Sisni Warini, Firani Putri, Arifmiboy, "Implikasi Landasan Historis Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Modern", *Jurnal El-Rusyd*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 23.

¹³ Gunawan Santoso, Nabila Khairunnisa ddk, "Filsafat Konten Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan Untuk Generasi Z Bangsa Indonesia", *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol. 02 No. 02, Juni 2023, hlm. 217.

Fajarwati.¹⁴ Ada juga tulisan mengenai "Pemikiran dan Tindakan Politik Hasan Tiro" yang ditulis oleh Abrar Muhammad Yus dalam sebuah jurnal.¹⁵ Dan tulisan jurnal lainnya mengenai "Gagasan Politik Hasan Muhammad Di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh" yang di tulis oleh Fadhil Ilhamsyah.¹⁶ Namun, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang "Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh". Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa jurnal, skripsi dan buku yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan judul yang akan diteliti sebagai referensi pembanding.

Rujukan pertama berasal dari buku "*Konsep Politik Hasan Tiro Dalam Melihat Aceh*" yang di tulis oleh Fajarwati, di terbitkan oleh Bandar Publishing cetakan pertama pada tahun 2021. Buku ini menyajikan gambaran tentang konsep politik Hasan Tiro, penyusunan buku ini bertujuan untuk menggambarkan pemikiran Hasan Tiro, dan menjaga sejarah politik yang telah diukir oleh Hasan Tiro Tentang Aceh. Buku ini juga merupakan bagian dari upaya untuk generasi hari ini yang banyak tidak mengenalnya, bahkan sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi di Aceh mulai dari tahun 1976 sampai tercapainya perdamaian. Generasi hari ini kurang mengetahui sejarah politik yang dibangun oleh Hasan Tiro di Aceh.¹⁷

¹⁴ Fajarwati, "*Konsep Politik Hasan Tiro Dalam Melihat Aceh*", (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021).

¹⁵ Abrar Muhammad Yus, "Pemikiran Dan Tindakan Politik Hasan Tiro", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 54, Mei 2020.

¹⁶ Fadhil Ilhamsyah, "Gagasan Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh", *Jurnal Public Policy*, Vol.4, No.1 April 2018.

¹⁷ Fajarwati, "*Konsep Politik Hasan Tiro Dalam Melihat Aceh*", (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021).

Rujukan kedua berasal dari jurnal "Pemikiran dan Tindakan Politik Hasan Tiro" yang di tulis oleh Abrar Muhammad Yus, Jurnal ini membahas tentang pemikiran dan tindakan politik Hasan Tiro, tokoh terkemuka dalam perjuangan politik rakyat Aceh. Jurnal ini mengkaji tiga periode perjuangan politiknya: awal karir dan penerusannya dari Tgk. Daud Beureueh, deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan periode penyesuaian politik. Jurnal ini juga menyoroti pergeseran dalam ideologi politik Hasan Tiro dari nilai-nilai agama ke pendekatan yang lebih sekuler. Sejarah perlawanan Aceh terhadap kekuatan kolonial dan keinginan untuk merdeka juga dibahas. Jurnal ini menyimpulkan dengan menekankan pentingnya memahami eksploitasi ekonomi dan politik yang dihadapi Aceh serta peran Hasan Tiro dalam gerakan nasionalis.¹⁸

Rujukan ketiga berasal dari jurnal yang di tulis oleh Fadhil Ilhamsyah. Dalam penelitian ini, Fadhil Ilhamsyah mengulas dalam jurnalnya tentang "Gagasan Politik Hasan Muhammad Di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh". Jurnal ini membahas pemikiran nasionalisme Aceh oleh Hasan Muhammad di Tiro dan pengaruhnya terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemikiran nasionalisme Aceh ini merupakan refleksi kekecewaan terhadap pengelolaan sumber daya alam Aceh oleh Pemerintah Indonesia. Pemikiran ini dipengaruhi oleh sejarah kejayaan kerajaan Aceh dan menginspirasi pembentukan GAM. Gerakan ini awalnya berjuang untuk kemerdekaan Aceh, namun setelah bencana tsunami, perjuangan GAM berubah menjadi perjuangan politik dan diplomasi. Meskipun Aceh tidak

¹⁸ Abrar Muhammad Yus, "Pemikiran Dan Tindakan Politik Hasan Tiro", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 54, Mei 2020.

mencapai kemerdekaan yang diinginkan, nasionalisme Aceh tetap hidup dalam masyarakat Aceh saat ini, terutama dalam keinginan untuk perdamaian dan implementasi Perjanjian Helsinki untuk kemakmuran dan kesejahteraan.¹⁹

Referensi lain yang menjadi sumber primer untuk penulisan skripsi ini adalah buku-buku karya Hasan Tiro. Diantaranya adalah "*Demokrasi Untuk Indonesia*". Buku ini membahas konsep negara yang dicita-citakan oleh Hasan Tiro.²⁰ Buku karya Hasan Tiro lainnya adalah "*The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro*". Buku ini membahas profil Hasan Tiro serta perjalanan hidup sang tokoh proklamator tersebut.²¹ Selain itu, Buku "*Aceh di Mata Dunia*" yang ditulis oleh Hasan Tiro membahas pandangan internasional terhadap Aceh, termasuk sejarah, politik, dan perjuangan rakyat Aceh. Hasan Tiro menggambarkan bagaimana Aceh dilihat oleh dunia luar, dengan penekanan pada konflik, perjuangan kemerdekaan, dan aspirasi politik Aceh dalam konteks global. Buku ini juga mengeksplorasi dampak kolonialisme, perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia, serta visi Hasan Tiro untuk masa depan Aceh yang lebih mandiri dan sejahtera.²²

Perbedaan antara beberapa penelitian lain dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada judul penelitian, serta fokus pembahasannya berbeda. Dari beberapa penelitian lain hanya membahas tentang politik Hasan Tiro

¹⁹ Fadhil Ilhamsyah, "Gagasan Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh", *Jurnal Public Policy*, Vol.4, No.1 April 2018.

²⁰ Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, (Jakarta: Teplok Press, 1999).

²¹ Tengku Hasan di Tiro, *The Price of Freedoms*, (Acheh Sumatra: National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984).

²² Teungku Hasan M. di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020).

dan beberapa ideologinya. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas tentang biografi singkat Muhammad Hasan Tiro, perjuangan Hasan Tiro di Aceh dan perspektif kombatan GAM di wilayah Pidie terhadap perjuangan Hasan Tiro yaitu “Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh Dalam Perspektif Kombatan GAM (Studi Pada Kombatan GAM di Wilayah Pidie)”. Dengan demikian meskipun kedua penelitian tersebut terkait dengan tokoh terkemuka Aceh yaitu Muhammad Hasan di Tiro, namun fokus pembahasan yang diteliti akan berbeda antara penelitian lain dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dari kajian-kajian yang ada memperlihatkan secara umum tentang Hasan Tiro dan landasan historis perjuangan Hasan Tiro dalam perspektif Kombatan GAM masih belum ada yang di fokuskan.

1.7 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode historis (metode sejarah) dengan pendekatan biografi. Pendekatan biografi adalah penelitian kualitatif terhadap individu serta pengalamannya yang dituliskan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Menurut Toyidin biografi adalah riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Pembaca membaca biografi orang lain biasanya ingin tahu ideologinya, kehidupannya, perjuangannya, dan lain-lain.²³ Menurut Kuntowijoyo penelitian historis mempunyai lima tahap, pertama: pemilihan topik, kedua: pengumpulan sumber, ketiga: verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), keempat: interpretasi (analisis dan sintesis), dan

²³ Abd. Hadi dkk, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 43-46.

kelima: penulisan.²⁴ Oleh karena itu, pemilihan topik sudah dilakukan, maka disini penulis hanya menjelaskan empat langkah penelitian. Berikut empat tahapan dalam metode sejarah:

1. Heuristik (pengumpulan data)

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan.²⁵ Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang dipilih, khususnya dengan membaca buku, jurnal, artikel, website dan foto yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Penulis menggunakan sumber berikut selama tahap heuristik:

a. Studi Literatur (Perpustakaan)

Penulis studi literatur ini menyusun berbagai referensi tentang topik yang mereka pilih. Sumber yang digunakan harus relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk buku, artikel, dan publikasi ilmiah. Penulis mengunjungi beberapa perpustakaan di Banda Aceh dan website-website terpercaya sebagai bagian dari literature review. Penulis meninjau banyak sumber dari berbagai buku dan jurnal yang diperoleh baik secara eksternal maupun internal. Oleh karena itu, untuk memperkuat data di lapangan saat menyusun skripsi ini, penulis mengkaji berbagai literatur baik berupa buku, artikel, jurnal ilmiah terkait hal-hal yang berkaitan dengan sejarah khususnya landasan historis perjuangan Hasan Tiro di Aceh dalam perspektif kombatan GAM (studi pada kombatan GAM di wilayah Pidie).

²⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, Juli 2018), Edisi Baru, hlm. 69.

²⁵ Mochammad Afroni "Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 274.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia kehidupannya. Wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁶

Dalam melakukan wawancara penulis memilih informan yang mengalami, melihat langsung atau terlibat dalam perjuangan Hasan Tiro. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para kombatan GAM di wilayah Pidie, diantaranya adalah Menteri Pertahanan GAM, Tim Perundingan di Helsinki, Pasukan Eks Libya GAM, Panglima Sagoe GAM, dan Tokoh Masyarakat Tiro.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber-sumber sejarah terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik untuk memastikan keabsahan sumber tersebut. Kritik ekstern digunakan untuk menilai keaslian sumber dengan memeriksa aspek luar atau fisik sumber tersebut. Sementara itu, kritik intern digunakan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mengevaluasi isi atau substansi dari sumber tersebut.²⁷

Sebelum penulis mencantumkan sebuah sumber, penulis terlebih dahulu memverifikasi sumber tersebut dengan menggunakan kritik ekstern untuk menguji keaslian data yang telah diperoleh. Setelah memastikan keaslian sumber data,

²⁶ Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Artikel Media Litbangkes*, Vol. 3, No. 01, 1993, hlm. 17-18.

²⁷ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 105.

langkah selanjutnya adalah menggunakan kritik intern untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas sumber sejarah. Kritik intern berguna untuk menentukan keabsahan sumber dengan membandingkan berbagai sumber yang membahas topik yang sama. Dengan cara ini, penulis dapat menemukan keabsahan sumber data yang digunakan.

3. Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah)

Interpretasi adalah langkah penafsiran terhadap sumber-sumber data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses interpretasi ini sering dianggap sebagai sumber subjektivitas.²⁸ Dengan menggunakan pendekatan biografi, penulis berusaha menafsirkan bukti sejarah terkait riwayat hidup Muhammad Hasan Tiro. Kemudian dengan perjuangan Muhammad Hasan Tiro dan perspetif kombatan GAM terkait perjuangan Hasan Tiro, peneliti berusaha menafsirkan bukti sejarah terkait perjuangan-perjuangan Hasan Tiro. Setelah itu, data-data tersebut dijadikan satu kesatuan dengan menggunakan, sehingga dapat terlihat landasan historis perjuangan Hasan Tiro di Aceh dalam perspektif kombatan GAM (studi pada kombatan GAM di wilayah Pidie).

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi adalah proses penulisan hasil penelitian yang sumber-sumbernya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Abdurrahman, historiografi melibatkan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) hingga akhir (penarikan

²⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, hlm 78.

kesimpulan), sehingga menghasilkan sebuah tulisan baru.²⁹ Tahap ini dilakukan secara sistematis dan kronologis agar menjadi karya ilmiah yang dapat dipahami, dimengerti, dan diterima oleh kalangan akademis.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi pembahasan skripsi ini, penulis membagi empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, Oleh karena itu, dalam hal ini penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Bab satu, pada bagian pertama, penulis menyajikan pendahuluan dan beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar yang diperlukan untuk memulai penelitian ini. Terdapat sub-bab yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan dasar-dasar yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.

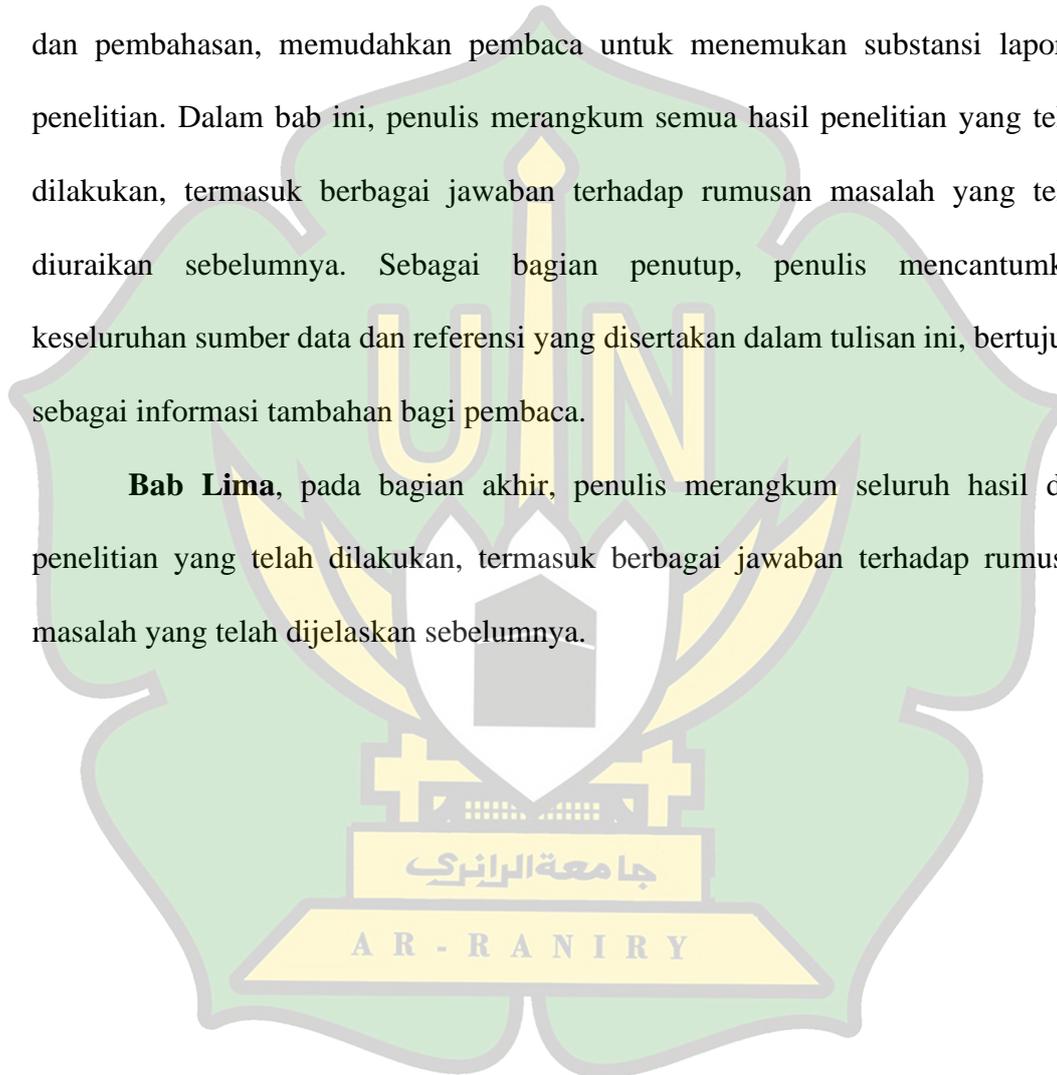
Bab dua, pada bagian kedua, penjelasan diberikan mengenai berbagai teori dan konsep yang memiliki hubungan serta relasi dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Hal ini dianggap sebagai suatu acuan dan kerangka serta dasar yang dapat dijadikan sebagai panduan oleh penulis. Tujuannya adalah agar penulis sendiri tidak menyimpang dari pembahasan utama yang ingin disampaikan dalam hasil penelitian.

²⁹ Nurhayati, "Penulisan Sejarah (Historiografy): mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, Vol. 1, No.1, Jan-Des 2016, hlm 257.

Bab tiga, penulis menjabarkan tentang lokasi penelitian, menjelaskan tentang letak geografis, pendidikan, mata pencarian kegiatan ekonomi dan sosial budaya.

Bab empat, pada bagian keempat, menyajikan hasil dari suatu penelitian dan pembahasan, memudahkan pembaca untuk menemukan substansi laporan penelitian. Dalam bab ini, penulis merangkum semua hasil penelitian yang telah dilakukan, termasuk berbagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai bagian penutup, penulis mencantumkan keseluruhan sumber data dan referensi yang disertakan dalam tulisan ini, bertujuan sebagai informasi tambahan bagi pembaca.

Bab Lima, pada bagian akhir, penulis merangkum seluruh hasil dari penelitian yang telah dilakukan, termasuk berbagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.



BAB II

KARANGKA TEORI

2.1 Teori Fungsional Konflik Lewis A. Coser

a. Teori Konflik Lewis A. Coser

Lewis Alfred Coser adalah seorang sosiolog amerika yang hidup pada tahun 1913 sampai pada tahun 2003. Coser adalah sosiolog pertama yang menyatukan teori konflik dan fungsi struktural yang berkembang di masyarakat.³⁰ Inti dari teori konflik ialah bagaimana hubungan masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan bermasyarakat. Teori konflik melihat bahwa pertikaian dan konflik merupakan bagian dari *system social* yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi hal tersebut dapat diminimalkan melalui beberapa konsensus yang disepakati bersama. Pada paradigma ini, konflik tidak dilihat dari dinamika negatif. Konflik juga dapat bermakna positif, terutama sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan serta adaptasi dari kelompok dan interaksi sosial.³¹

Teori konflik yang dikembangkan oleh Coser merupakan refleksi pemikiran Simmel. Yang dapat dikonsepsikan Coser merupakan sebuah sistem sosial yang bersiat fungsional. Menurut Coser konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Oleh sebab itu konflik bisa dapat menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Menurut Coser konflik merupakan salah satu interaksi dan satu

³⁰ Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 54.

³¹ Herman Arisandi. *Pemikiran tokoh-tokoh Sosiologi dari klasik sampai modern*, (Yogyakarta: Ircisod, 2015) hlm.147-148.

bentuk interaksi dan tidak perlu untuk diingkari keberadaannya. Seperti juga halnya dengan George Simmel, yang berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dasar dan proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam berbagai cara yang tidak terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks.³² Coser menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional yang bersangkutan. Konflik juga bisa menimbulkan konsekuensi positif, dan dapat dijelaskan konflik bersifat menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan.

Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan, status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Coser juga menyatakan konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak persatuan serta perdamaian. Dengan hadirnya konflik dapat juga menyumbang banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antar anggotanya. Seperti menghadapi musuh bersama, mengintegrasikan orang, dan membuat orang lupa akan perselisihan. Konflik adalah cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada dan sudah disepakati. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah hal-hal yang bersangkutan dengan dinamika hubungan antara *in group* dengan *out group*. Beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser adalah kekuatan

³² Wirawan, *Teori-Teori sosial dalam tiga paradigma*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 82.

solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam *in group* akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan. Para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi kalau mereka tidak dapat dibujuk ke jalan yang benar, mereka akan di usir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.³³

Coser membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistik dan nonrealistik. Pertama konflik realistik. Jenis konflik ini merupakan bagian dari sebuah kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan. Konflik ini ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan, misalnya tuntutan upah gaji, yang dilakukan oleh karyawan atau buruh. Kedua, konflik nonrealistik jenis konflik ini bukan berasal dari tujuan-tujuan pesaing yang antagonis. Akan tetapi, konflik nonrealistik lebih merupakan upaya meredakan ketegangan diantara beberapa pihak. Seperti contoh suatu mitos diyakini sebuah kepercayaan bagi masyarakat yang buta huruf.³⁴

b. Fungsi Positif dan negatif Lewis A. Coser

Konflik adalah cara atau alat untuk mempertahankan, menyatukan, atau bahkan memperkuat sistem sosial yang telah disepakati bersama. Contoh paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah yang berhubungan dengan

³³ Wirawan, *Teori-Teori social dalam tiga paradigma...*, hlm. 83.

³⁴ Limas Dodi, *Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional Tentang Konflik, Jurnal Al-Adl*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017, hlm. 107.

dinamika hubungan di dalam dan di luar kelompok. Beberapa saran Lewis A.

Coser:

1. Ketika tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok eksternal meningkat, kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok di dalam kelompok meningkat.
2. Semakin terintegrasi suatu kelompok yang terlibat dalam suatu konflik, semakin kuat pula batas-batas antara kelompok tersebut dengan kelompok lain di kawasan tersebut, terutama yang bermusuhan.
3. Di dalam kelompok, mungkin ada toleransi yang lebih kecil untuk perpecahan, perdebatan, dan tekanan yang lebih besar untuk kesepakatan dalam konflik.
4. Penyimpangan dalam kelompok tidak akan ditoleransi lagi dan akan dikeluarkan atau diawasi secara ketat jika tidak dapat mengikuti jalan yang benar.
5. Sebaliknya, jika kelompok tidak terancam konflik dengan kelompok eksternal yang bermusuhan, tekanan kuat untuk mengikat, menyesuaikan, dan melekat pada kelompok dapat dikurangi.³⁵

Konflik dapat bersifat negatif bila dipandang sebagai pemicu atau masalah yang dapat melemahkan hubungan masyarakat. Dalam konteks ini, Coser mengemukakan hubungan sosial yang intim (dekat), konflik dan solidaritas kelompok, konsekuensi konflik, belenggu konflik dan pemeliharaan fungsi sosial, konflik dan permusuhan nyata dan tidak nyata, dan menempatkan teorinya pada

³⁵ Herman Arisandi, *Pemikiran tokoh-tokoh Sosiologi...*, hlm. 147.

berbagai aspek analisis struktur sosial. Dalam masyarakat mana pun, mekanisme sering kali dirancang untuk meredakan ketegangan ketika ketegangan itu muncul, sehingga integritas seluruh struktur tidak terancam. Mekanisme yang digunakan sebagai jalan keluar dari permusuhan antar pihak inilah yang disebut Coser sebagai katup pengaman. Coser menyadari bahwa konflik dapat membahayakan persatuan. Oleh karena itu, metode telah dikembangkan untuk mengurangi atau meredakan bahaya. Bagi Coser, katup pengaman ini adalah sebuah sistem. Coser kemudian menunjukkan bahwa semua elemen yang terlibat dalam fasilitas sosial juga harus dimasukkan dalam katup pengaman. Katup pengaman dapat berupa pranata sosial serta perilaku dan kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan karena konflik tidak dapat dibimbing dengan baik dan benar.³⁶

Dalam kasus Aceh, konflik yang dipimpin oleh Hasan Tiro dan GAM merupakan reaksi terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Konflik ini berfungsi sebagai sarana untuk menantang status quo dan memperjuangkan hak-hak yang dianggap terabaikan. Selain itu, konflik tersebut memperkuat identitas kolektif masyarakat Aceh dan meningkatkan solidaritas di antara anggota gerakan, sesuai dengan pandangan Coser bahwa konflik internal dapat meningkatkan kohesi kelompok.

Konflik ini juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketegangan latent yang ada dalam masyarakat Aceh, yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi dan eksploitasi sumber daya. Meskipun konflik ini membawa

³⁶ Wirawan, *Teori-Teori social dalam tiga paradigma...*, hlm. 87.

dampak destruktif, pada akhirnya, ia juga memaksa terjadinya perubahan politik yang signifikan, seperti penandatanganan Perjanjian Helsinki pada 2005 dan pemberian otonomi khusus bagi Aceh. Dengan demikian, teori konflik Coser membantu menjelaskan bagaimana konflik di Aceh berfungsi tidak hanya sebagai bentuk perlawanan, tetapi juga sebagai alat untuk perubahan sosial dan pembentukan identitas kelompok yang lebih kuat.

2.2 Teori Kedaulatan

a. Pengertian kedaulatan

Secara etimologis, dalam bahasa Arab yaitu *daulah* berarti kedaulatan mempunyai makna dinasti pemerintahan atau kekuasaan. Kedaulatan sendiri merupakan terjemahan dari *katasovereignty* (Inggris), *Sovranus* (Italia), *Sovereinete* (Prancis) inti maknanya sama yaitu yang teratas atau yang tertinggi.³⁷ Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga berperan signifikan dalam melestarikan dan menyebarkan warisan budaya suatu bangsa. Warisan budaya, seperti tradisi, bahasa, dan kepercayaan, menjadi bagian integral dari kedaulatan negara dan berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat identitas nasional serta mempromosikan pemahaman dan toleransi di tingkat internasional. Oleh karena itu, pemahaman kedaulatan yang menyeluruh harus mencakup dimensi politik dan hukum, serta keberagaman budaya yang merupakan warisan bangsa.³⁸

³⁷ Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, "Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional", *Jurnal Jendela Hukum*, ISSN Cetak & Online: 2355-5831/ 2355-9934, hlm. 50.

³⁸ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2016), hlm. 92.

b. Kedaulatan Negara Joseph Gabriel Starke

Teori kedaulatan negara dapat disederhanakan sebagai konsep bahwa negara memiliki kedaulatan karena adanya rakyat yang menjadi bagian dari negara tersebut. Kedaulatan ini memberi negara hak untuk menetapkan dan menjalankan yurisdiksi sendiri, dan oleh karena itu, negara lain harus menghormati kedaulatan tersebut.³⁹ Teori kedaulatan negara berperan sebagai dasar penerapan hukum nasional di suatu negara. Menurut Joseph Gabriel Starke, kedaulatan merupakan elemen penting dalam pembentukan negara, karena berfungsi sebagai kekuasaan tertinggi yang menekankan pada otoritas negara. Selain itu, kedaulatan juga memiliki fungsi eksternal sebagai alat untuk menyelesaikan masalah di ranah internasional. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dianggap sebagai norma fundamental yang tidak tunduk pada otoritas lain. Teori ini mengacu pada struktur wewenang dalam negara dan kemampuan struktur tersebut untuk mengatur perilaku warganya secara efektif.

Teori kedaulatan negara mengacu pada empat hal utama yang menjadi acuan bahwa negara tersebut adalah negara yang berdaulat. Adapun sistem otoritas politik yang memengaruhi kedaulatan negara adalah:

- 1) Kewilayahan (*territoriality*), bahwa berjalannya otoritas politik sebagai negara yang berdaulat dijalankan di wilayah geografis yang jelas.
- 2) Otonomi (*autonomy*), bahwa negara yang berdaulat merupakan negara yang memiliki kendali penuh atas urusan dalam negaranya sendiri.

³⁹ Danel Aditia Situngkir, "Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional". *Jurnal Lex Librum*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018, hlm. 659.

- 3) Pengakuan Bersama (*mutual recognition*), bahwa dengan adanya gelar negara yang berdaulat maka harus didasari oleh pengakuan berdaulat dari negara lain secara hukum untuk saling mengakui satu sama lain sebagai negara yang berdaulat.
- 4) Kontrol (*control*), bahwa negara yang berdaulat tidak hanya memiliki wewenang untuk bertindak, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengontrol urusan internal di dalam negeri.⁴⁰

Dalam konteks perjuangan Hasan Tiro, kedaulatan mengacu pada keinginan rakyat Aceh untuk memiliki hak menentukan nasib sendiri, bebas dari campur tangan pemerintah pusat Indonesia. Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuntut pengakuan atas kedaulatan Aceh yang dianggap telah dicabut secara paksa melalui aneksasi oleh negara Indonesia.

⁴⁰ Stephen D. Krasner, "Rethinking the sovereign state model", (terj. Google Terjemahan), *Review of International Studies*, Vol. 27, No. 17, 2001, hlm. 42.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Kondisi Geografi Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menetapkan lokasi penelitian. Menurut S. Nasution, perlu dipertimbangkan tiga unsur penting dalam menetapkan lokasi penelitian. Adapun ketiga hal tersebut yang pertama adalah tempat, kedua pelaku, dan yang tiga kegiatan.⁴¹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berada di gampong Mns. Mancang, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Secara geografis gampong Mns. Mancang Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie merupakan bagian kabupaten Pidie, berkaitan dengan asal usul terbentuknya gampong Mns. Mancang. Gampong Mns. Mancang termasuk dalam daerah yang kategori daerahnya daratan rendah dengan ketinggian ± 50 Meter permukaan laut. Sedangkan gampong ini memiliki luas 11 x 10 M. Letak astronomis gampong Mns. Mancang adalah antara $U05^{\circ}. 12'.50.9''$ T. $095^{\circ}. 57.05.0''$.

Adapun batas-batas wilayah gampong Mns. Mancang Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie yaitu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Gampong Lhok Igeuh
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Gampong Peunandok
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Pulo Glumpang
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Sakti

⁴¹ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kuantitatif*, (Bandung: Tarsinto, 1996), hlm. 43.

Adapun luas wilayah gampong Mns. Mancang adalah 4.5 Km² yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah: 60 Ha Tanah
- b. bukan sawah: 121 Ha

Letak geografis gampong Mns. Mancang Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie terletak antara 5° 12'34,2" N dan terletak di 95° 56'32, 0"BT.⁴²



Gambar 3. 1 peta penelitian di gampong Mns. Mancang yang bersumber dari google.

Berdasarkan data yang diperoleh dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM) gampong Mns. Mancang, jumlah penduduk Gampong Mns. Mancang terus mengalami pertumbuhan sehingga jumlah penduduk sekarang adalah berjumlah 702 jiwa dan luas wilayah mencapai 4,5 km².⁴³

⁴² RPJM Gampong Mns. Mancang, *Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie Tahun 2016-2021*, hlm. 16.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kecamatan Tiro/Truseb, *Kecamatan Tiro/Truseb Dalam Angka 2021*, (Badan Pusat Statistik), hlm. 17.

Table 3.1
Jumlah Penduduk perdesun Gampong Mns. Mancang

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Dusun Baroh	219
2	Dusun Teungoh	205
3	Dusun Dayah Blang	81
4	Dusun Dayah Krueng	197
	Total	702

Sumber: RPJM, Gampong Mns. Mancang tahun 2020-2024

3.2 Sistem Budaya Masyarakat

Kebudayaan adalah apa saja yang dihasilkan dari pikiran maupun karyanya manusia. Sedangkan interaksi sosial merupakan unsur paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok orang, dan antara orang dengan kelompok orang. Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerjasama, atau upaya untuk mengurangi untuk meredakan pertentangan.⁴⁴ Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia. Edward Burnett Tylor mengatakan bahwa budaya adalah kompleks dari semua pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang dimiliki setiap manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian lain budaya adalah pengembangan dari kata majemuk mengolah yang berarti kekuatan pikiran, dan dengan demikian perbedaan antara budaya.⁴⁵

Hubungan antara kebudayaan dan faktor sosial saling terkait erat. Keterkaitan tersebut meliputi pola perilaku yang dihasilkan melalui interaksi sosial,

⁴⁴ Soejono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 76.

⁴⁵ Djoko Widagdho, dkk., *Ilmu Budya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 18.

semua perilaku dan produk yang dihasilkan oleh individu sebagai anggota masyarakat ditemukan melalui interaksi simbolik. Budaya terbentuk dengan mengembangkan dan mengkomunikasikan kepercayaan masyarakat melalui simbol-simbol tertentu. Misalnya, simbol linguistik sebagai seperangkat simbol yang digunakan untuk menyampaikan keyakinan budaya di antara individu-individu dalam masyarakat.⁴⁶

Masyarakat di Meunasah Mancang memiliki sistem budaya yang erat kaitannya dengan adat istiadat Aceh. Sistem budaya di desa seperti ini biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kehidupan sosial, keagamaan, hingga tata cara dalam berinteraksi dengan sesama. Budaya gotong royong sangat kuat, terutama dalam kegiatan seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, dan membantu sesama dalam acara-acara adat atau keagamaan. Keagamaan adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan di gampong Meunasah Mancang. Setiap hari, anak-anak dan orang dewasa datang ke Meunasah untuk mengaji. Mereka belajar membaca Al-Quran, hadits, dan ilmu agama lainnya. Selain itu, hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj dirayakan dengan penuh kebersamaan dan khidmat. Semua warga ikut serta dalam perayaan tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Alo Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 109.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman (75 Tahun), Tokoh Masyarakat Tiro, Pada tanggal 18 Mei 2024.

3.3 Gambaran Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan diwujudkan dengan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.⁴⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM) gampong Mns. Mancang, banyaknya sekolah dan kelas jenjang pendidikan dan sekolah dalam gampong Mns. Mancang yaitu memiliki 2 unit jumlah sekolah dasar untuk negeri.

Selain itu, anak-anak gampong Mns. Mancang yang menempuh pendidikan agama di pesantren daerah dan diluar daerah. Pendidikan agama merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, karena pendidikan agama merupakan kondisi dunia dan nantinya sekaligus sarana untuk meningkatkan khususnya keimanan seseorang kepada Allah SWT.⁴⁹ Pendidikan yang diterima oleh masyarakat dapat mempengaruhi kemajuan di suatu daerah. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam sebuah bangsa.

3.4 Mata Pencarian dan Kegiatan Ekonomi

Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan

⁴⁸ Abd Rahman BP ddk, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan, *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*: Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hlm. 1.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman (75 Tahun), Tokoh Masyarakat Tiro, Pada tanggal 18 Mei 2024.

budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.⁵⁰ Kecamatan Tiro, khususnya Gampong Mns. Mancang, memiliki sumber daya manusia yang beragam dan mampu menciptakan berbagai jenis lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Table 3.2
Jumlah berbagai jenis pekerjaan Penduduk gampong Mns. Mancang

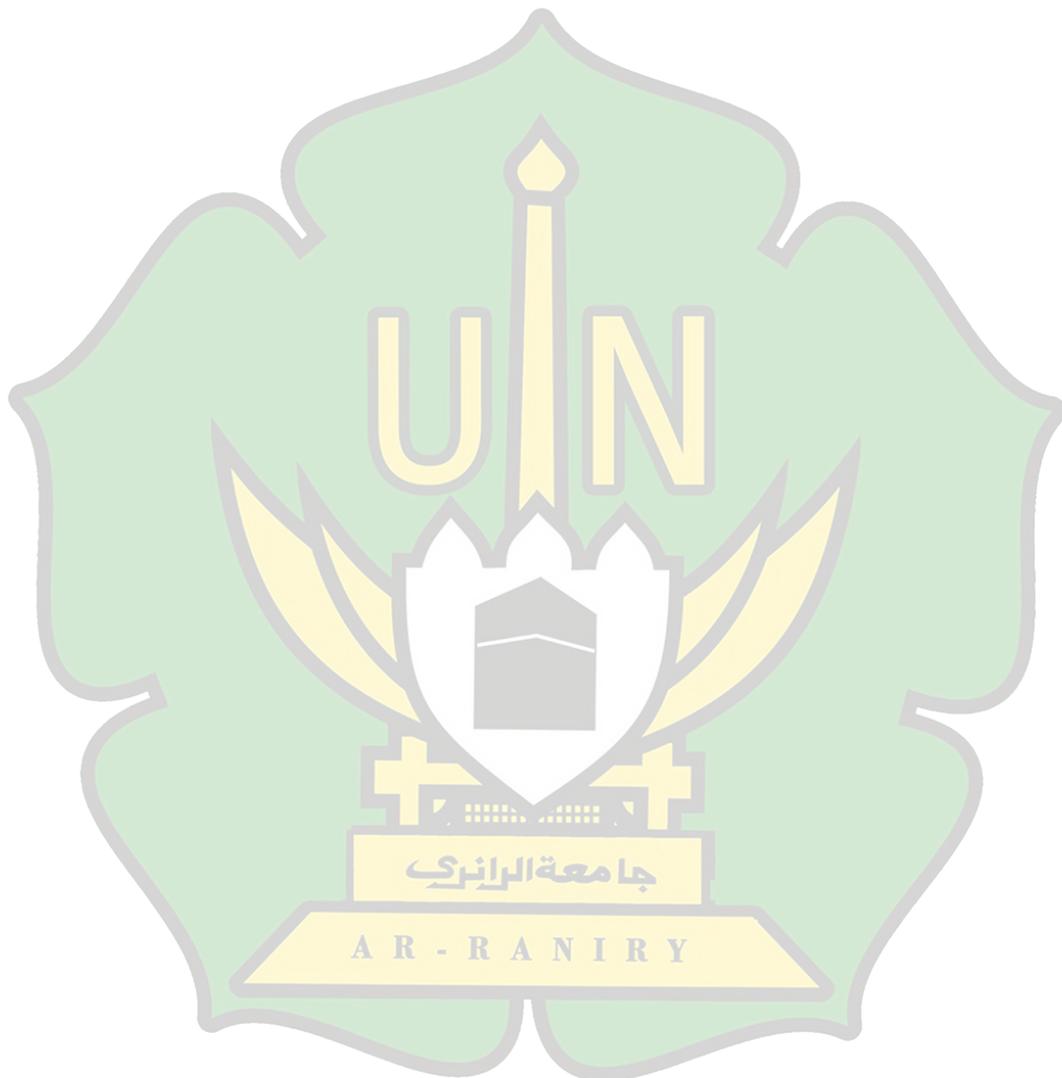
NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/pekebun	143
2	Wiraswasta	37
3	Buruh harian lepas	2
4	Karyawan swasta	33
5	Pegawai negeri sipil	49
6	Mengurus rumah tangga	85
7	Pelajar/mahasiswa	265
8	Buruh tani/pekebun	43
9	Belum/Tidak bekerja	88
10	Lainnya	-
	Jumlah	702

Sumber: RPJM, Gampong Mns. Mancang tahun 2020-2024

Masyarakat Gampong Mns. Mancang umumnya bekerja menggarap sawah, ladang, dan kebun sebagai pekerjaan utama. Potensi terbesar di Gampong Mns. Mancang adalah sektor pertanian, terutama dari hasil tanaman padi. Selain pertanian, beberapa masyarakat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, buruh, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Selain bertani, sebagian masyarakat juga beternak, baik dalam skala besar maupun kecil, dengan hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek. Kegiatan peternakan ini bukan merupakan

⁵⁰ Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005), hlm.32.

pekerjaan utama, melainkan sebagai pekerjaan tambahan untuk meningkatkan sumber ekonomi keluarga dan keberlangsungan hidup.⁵¹



⁵¹ Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman (75 Tahun), Tokoh Masyarakat Tiro, Pada tanggal 18 Mei 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Biografi Singkat Hasan Tiro

1. Silsilah singkat Hasan Tiro

Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, M.S., M.A.,LL.D., Ph.D. Atau sering disapa Tgk Hasan Tiro lahir pada tanggal 25 September 1925 di kampung Tanjong Bungong, Lamlo, kecamatan Kota Bakti kabupaten Pidie. Nama asli hasan tiro yaitu Hasan bin Leube Muhammad. Ayahnya bernama Leube Muhammad dan ibunya bernama Pocut Fatimah Binti Mahyidin Binti Teungku Syekh Muhammad Saman Binti Syekh Teungku Abdullah. Leube pada pangkal nama Muhammad adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat karena alim. Jenjang gelar Leube yakni untuk Teungku Meunasah, gelar tertinggi disebut Teungku Chik. Teungku Leube Muhammad merupakan seorang qadhi, yakni qadhi untuk hulubalang Cumbok dan qadhi Teungku Fakeh Pidie.

Secara silsilah keluarga, hubungan antara Hasan Tiro dan Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman hanya dapat ditelusuri melalui garis keturunan sebelah pihak perempuan. Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman memiliki beberapa orang anak, antara lain Muhammad Amin, Teungku Zainoel Abidin (Teungku Lambada), Teungku di Buket (Teungku Beb), Teungku Sulaiman, Teungku Mahyiddin di Tiro (ayah dari ibu Teungku Hasan Muhammad di Tiro), dan Teungku Muaz.⁵²

⁵² Fajarwati, *Konsep Politik Hasan Tiro...*, hlm. 29.

Melalui Teungku Mahyiddin (ayah dari ibu Hasan Tiro) inilah yang menjadi garis keturunan Hasan Tiro dengan Teungku Chik di Tiro, ini berarti bahwa Hasan Tiro masih dianggap sebagai cucu dari Teungku Chik di Tiro, meskipun garis keturunannya berasal dari ibunya. Dalam konteks ini, kedudukan Hasan Tiro dalam silsilah keluarga lebih didasarkan pada hubungan keturunan melalui garis ibunya daripada melalui garis ayahnya. Namun ada kontroversi mengenai asal-usul Hasan Tiro, karena menurut catatan sejarah, ahli waris Teungku Chik di Tiro yang sah adalah Al Mutsanna, anak Tengku Abdul Wahab dan cucu Teungku Umar Tiro. Sedangkan Hasan Tiro, nama lengkap yang seharusnya adalah Hasan Luebe Muhammad Tanjong Bungong.⁵³ Meskipun itu, menurut penulis Hasan Tiro layak dikatakan sebagai pejuang, karena telah memperjuangkan tempat kelahirannya yang mana pada masa itu menuntut segala hak-hak masyarakat Aceh, hingga saat ini kita dapat melihat bagaimana dengan kekayaan alam di Aceh tetapi dinobatkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

2. Riwayat Pendidikan Hasan Tiro

Pada tahun 1931, Hasan Tiro memulai pendidikan pertamanya di Sekolah Rakyat (SR) di Lammeulo, Pidie. Dari tahun 1933 hingga 1939, pada usia 8 tahun, Hasan Tiro melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah. Kemudian, pada usia 15 tahun, dari tahun 1939 hingga 1943, Hasan Tiro bersekolah di Normal Islam Institute.⁵⁴ Pendidikan di Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah Blang Paseh, Pidie. Hasan Tiro dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, dan

⁵³ Fajarwati, *Konsep Politik Hasan Tiro...*, hlm. 35.

⁵⁴ Muhrizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang...*, hlm. 21.

pendidikan di Madrasah Normal Islam Institute Bireun, Hasan Tiro dipimpin oleh H.M. Nur el-Ibrahim. Dalam berbagai kesempatan, gurunya selalu mengajarkan berbagai ilmu, termasuk agama, ekonomi, dan politik. Dengan pendidikan yang diperoleh baik di madrasah maupun dari gurunya secara langsung, Hasan Tiro memperoleh pemahaman awal tentang nasionalisme. Ini terbukti ketika tokoh-tokoh Aceh mendukung kemerdekaan Indonesia, Hasan Tiro yang masih muda bergabung dengan barisan kepemudaan, yakni Barisan Pemuda Indonesia (BPI), di daerahnya.⁵⁵

Pada usia 21 tahun Hasan Tiro melanjutkan pendidikan kuliah di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta di fakultas Hukum. Hasan Tiro kuliah di UII atas rekomendasi dari Teungku Daud Beureeh kepada perdana menteri Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara. Hasan Tiro kembali ke Aceh setelah menyelesaikan pendidikannya di Yogyakarta dan bergabung dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah perdana menteri Sjafruddin Prawiranegara. Pada tahun 1950, Hasan Tiro mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi Master dan Ph.D. di Universitas Columbia, Amerika Serikat, dengan jurusan politik dan hukum internasional. Selama di Amerika, selain fokus pada studinya, Hasan Tiro juga bekerja dengan Kementerian Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵⁶

⁵⁵ Fajarwati, *Konsep Politik Hasan Tiro...*, hlm. 35.

⁵⁶ Muhrizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang...*, hlm. 22.

Tabel 4.1
Riwayat Pendidikan Hasan Tiro

RIWAYAT PENDIDIKAN HASAN TIRO		
Tahun	Umur	Nama Pendidikan
1931-19933	6 tahun	Sekolah di Sekolah Rakyat (SR)
1993-1939	8 Tahun	Sekolah di Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah
1939-1943	15 Tahun	Sekolah di Normal Islam Institute
1946-1948	21 Tahun	Kuliah di UII
1950	25 Tahun	1, Kuliah di Universitas Columbia 2. kuliah di Fordham University
1975	50 Tahun	University of Plano menyematkan gelar doktor kehormatan di bidang hukum LL.D.

Sumber: Muhrizal Hamzah, "Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh"

3. Pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Hasan Tiro merupakan pemimpin tertinggi kemerdekaan Aceh. Ia merupakan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 di kawasan gunung Halimon Pidie. Hasan Muhammad di Tiro ikut keluar masuk hutan bersama pasukannya sejak 1976 untuk memperjuangkan pemisahan Aceh dari Indonesia. Menurut Hasan Tiro, ratusan tahun sebelum Indonesia terbentuk, Aceh telah menjadi sebuah identitas politik sendiri, yang bukan saja besar dan makmur, tetapi juga diakui dunia internasional. Hasan Tiro beranggapan bahwa Aceh dan sejarahnya tidak dapat terpisahkan dengan Indonesia, menjadikannya bagian dari satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dengan harapan bahwa Indonesia memiliki sejarah bersama menjadi kekuatan dalam perumusan konsepsi sejarah Indonesia. Ia berharap bahwa Islam dan masyarakat yang telah berjuang sampai

titik darah penghabisan untuk memerdekakan Indonesia dapat bisa dijadikan sebagai suatu falsafah dan ideologi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, Hasan Tiro bercita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.⁵⁷

Latar belakang terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Dahulu, masyarakat Aceh membantu pemerintah pusat dari segi ekonomi dan aspek lainnya, namun pemerintah pusat mengkhianati masyarakat dengan ketidakadilan. Oleh karena itu, muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menuntut keadilan melalui kemerdekaan Aceh, yang dipimpin oleh Tgk Hasan Tiro pada masa itu.⁵⁸ Munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran, namun pembagian hasilnya tidak proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh. Ketidakadilan ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat. Fenomena ini seolah-olah menandakan adanya pilih kasih dari pemerintah dalam hal pembangunan, dengan lebih mengutamakan pembangunan di pusat daripada di daerah-daerah terjauh dan terluar. Akibatnya, sumber daya alam Aceh yang melimpah tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyat Aceh.

Pemberontakan GAM juga didasari oleh ideologi nasionalis keacehan yang dibangun oleh Hasan Tiro. Hasan Tiro meyakini bahwa Aceh memiliki sejarah

⁵⁷ Monika Sari, "Hasan Tiro: History of Aceh...", hlm. 30.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Zakaria Saman (78 Tahun), Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, pada tanggal 22 Juni 2024.

kejayaan di masa lampau yang memungkinkan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Sejarah Aceh yang penuh dengan perjuangan dan konflik, sejak tahun 1873, menunjukkan bahwa Aceh belum pernah merasakan kedamaian yang utuh.⁵⁹

4.2 Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh

Dampak panjang dari kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat muncul karena masyarakat Aceh telah memberikan kontribusi signifikan kepada Indonesia namun belum mendapatkan perhatian yang sepadan. Sebagai bukti, Aceh telah memberikan bantuan berupa dua pesawat terbang saat peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-3. Pada tahun 1949, masyarakat Aceh juga memberikan sumbangan berupa uang tunai kepada angkatan perang RI serta sumbangan yang sama untuk keperluan pemerintah Sukarno. Tindakan ini menunjukkan kesediaan dan kontribusi Aceh dalam membangun Republik Indonesia. Namun, di masa Orde Baru, Aceh dianggap sebagai sumber ekonomi utama bagi pemerintah pusat tanpa mendapatkan pengakuan yang layak atau perhatian terhadap masalah kemiskinan yang melanda wilayah tersebut. Hal ini menciptakan rasa ketidakpuasan yang mendalam di antara masyarakat Aceh terhadap perlakuan pemerintah pusat.⁶⁰

Landasan historis perjuangan Hasan Tiro di Aceh dapat diamati melalui beberapa aspek penting yang mencakup sejarah panjang hubungan antara Aceh dan

⁵⁹ Eka Auliana Pratiwi, "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)", *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, p-issn:2620-4789, hlm. 84

⁶⁰ Hany Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh", *Jurnal Jambura History and Culture*, Volume 1 issue 2, Juli 2019, hlm. 97.

pemerintahan pusat di Indonesia, serta identitas kultural dan politik yang kuat di kalangan masyarakat Aceh. Berikut ini adalah beberapa poin utama yang menjadi landasan historis perjuangan Hasan Tiro:

1. Kondisi Politik Pada Masa Hasan Tiro

Sepanjang sejarah Aceh, ulama memainkan peran krusial dalam membimbing dan menangani berbagai persoalan masyarakat, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, maupun dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Peran ini sangat penting dalam upaya menuju masyarakat yang makmur dan mandiri. Tak sedikit ulama yang memimpin perjuangan melawan penjajah di Aceh, menjadikan dayah yang mereka pimpin sebagai basis perlawanan terhadap penjajah seperti Belanda dan Jepang.⁶¹

Pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipelopori oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh terjadi karena berbagai sebab. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Menurut salah seorang pelaku sejarah yaitu Tgk. M. Nur El Ibrahimy mengemukakan bahwa peristiwa yang menjadi poblema nasional tersebut terjadi erat kaitannya dengan dan karena kecenderungan pusat (Jakarta) yang munafik dan para petinggi republik telah mengecewakan tokoh-tokoh ulama di Aceh. Pemberontakan tersebut memicu diadakannya kongres alim ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan pada bulan April 1953. Dalam kongres tersebut, Tgk. Muhammad Daud Beureueh memegang pucuk pimpinan sebagai ketua umum. Dengan suara bulat, kongres sepakat untuk mengambil keputusan memperjuangkan agar dalam pemilihan umum

⁶¹ Azis Muhajir, "Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan DI/TII Aceh", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, hlm. 1.

yang akan datang, negara Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia. Para ulama, cendekiawan, dan intelektual yang hadir dalam kongres pada saat itu telah di bai'ah (bersumpah) dengan diri mereka sendiri dan di hadapan Allah, bahwa mereka akan menjalankan dengan penuh kesungguhan setiap keputusan yang telah mereka buat, terlepas dari kesulitan atau kemudahan yang mungkin mereka hadapi.⁶²

Semenjak Indonesia merdeka Aceh tidak pernah melarang Indonesia untuk merekrut hasil alamnya karena Aceh menganggap Indonesia negara miskin yang memerlukan bantuan Aceh. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ketika Aceh diam maka Indonesia menjadi brutal dan thamak terhadap harta Aceh. Itulah yang terjadi di zaman lampau sehingga menimbulkan sikap memberontak dari para pemuda dan tokoh-tokoh Aceh dalam kasus Aceh Merdeka yang kemudian menjadi GAM.⁶³

Pemberontakan DI/TI pada tahun 1953-1959, Hasan Tiro mendukung pemberontakan DI/TI. Pada masa DI/TI sebagian orang sudah berdamai tetapi berdamai di atas kertas. Pada tahun 1970-an ditemukan sumber-sumber daya alam di Aceh, tetapi orang Aceh “*marginal*” artinya situasi orang Aceh dalam kemiskinan di dalam “lumbung padi”, pada akhirnya masyarakat Aceh marah makanya menghidupkan kembali sejarah Aceh dulu. Aceh secara historis, secara kedaulatan, secara keadilan, secara ekonomi dan lain-lain menyebabkan dasar bagi

⁶² Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry; Press, 2007), hlm. 86.

⁶³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Komparasi Eksistensi Dan Aplikasi Zaman Perjuangan Gam Dengan Gerakan Di/Tii Di Aceh Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022), hlm. 11.

orang Aceh untuk menghidupkan Aceh merdeka. Walaupun Hasan Tiro tinggal di luar daerah tetapi konsen terhadap kondisi Aceh yang miskin ketika ditemukan sumber-sumber ekonomi. contohnya sekarang gas besar ditemukan di lautan Aceh tetapi gas di Aceh tetap mahal.⁶⁴

Indonesia menolak kemerdekaan Aceh karena takut tidak bisa mengambil sumber daya alam yang ada di Aceh. Pandangan ini dapat diartikan, bahwa sumber daya alam Aceh sangat berharga bagi perekonomian Indonesia, sehingga hilangnya Aceh akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia.⁶⁵ Kondisi politik yang kompleks di Aceh selama masa perjuangan Hasan Tiro, yang berakar pada ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat Indonesia. Sejak masa penjajahan hingga era Orde Baru, sehingga menyebabkan Hasan Tiro berani memprotes dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh.

2. Gerakan Dalam Perjuangan Hasan Tiro

a. Pemimpin dan Pendukung Politik GAM

Hasan Tiro memainkan peran penting sebagai pemimpin politik bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah periode DOM. Ia mempengaruhi arah perjuangan GAM dan memimpin gerakan tersebut dalam upaya mencapai kemerdekaan Aceh secara politik. Awal mula pembentukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro menghubungi beberapa tokoh eks DI/TII, antara lain Teungku Ilyas Leubue, Muhammad Daud Husen (Daud Panuk). Dua tokoh ini

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Zakaria Saman (78 Tahun), Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, Pada tanggal 22 Juni 2024.

kemudian menggalang dukungan kepada pemuda-pemuda Aceh. Adapun tokoh lain yaitu dr. Zubir Mahmud, dr. Muchtar Yahya Hasbi Geudong, dr. Zaini Abdullah, dr. Husaini Hasan, Teungku Muhammada Taher Husen, Teungku Amir Ishak SH, Teungku Amir Mahmud, Ir. Asnawi Ali, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe dan Teungku Darul Kamal. Tujuan mereka mendirikan negara Aceh yang terlepas dari Indonesia. Maka, bertepatan pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka di gunung Halimun. Ini semua tidak terlepas dari peran dan dukungan oleh Muhammad Daud Beureueh dan para mantan tokoh republik Islam Aceh pada masa itu.⁶⁶

Dalam buku *The Price Of Freedoms*, Gerakan Aceh Merdeka atau NLFAS pada dasarnya adalah gerakan yang bersifat pendidikan dan damai. Penjajah Jawa/Indonesia lah yang menggunakan kekerasan untuk menindas kami. Apa pun yang terjadi setelahnya adalah reaksi yang diperlukan dari kami untuk membela diri.⁶⁷ Dalam narasi ini, Hasan Tiro mengidentifikasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau National Liberation Front of Aceh-Sumatra (NLFAS) digambarkan sebagai gerakan yang pada dasarnya bersifat pendidikan dan damai. Pernyataan ini menekankan bahwa tujuan awal gerakan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan secara damai, bukan melalui kekerasan. Selain itu, penggunaan istilah "penjajah Jawa/Indonesia" menunjukkan adanya pandangan dari penulis yaitu Hasan Tiro yang menganggap pemerintah Indonesia sebagai kekuatan penjajah yang mendominasi dan menindas Aceh.

⁶⁶ Fajarwati, *Konsep Politik Hasan Tiro...*, hlm. 110-113.

⁶⁷ Tengku Hasan di Tiro, *The Price of Freedoms...*, hlm. 15.

b. Diplomasi Internasional

Hasan Tiro juga melakukan upaya diplomasi internasional untuk mendukung perjuangan Aceh. Ia berusaha memperoleh dukungan dari komunitas internasional untuk mengakui dan mendukung hak kemerdekaan Aceh. Pada Rabu, 1 September 1954, Hasan Tiro mengetikkan konsep kegelisahannya dalam tiga lembar folio. Surat tersebut difax kepada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, dan berbagai media cetak serta tokoh penting lainnya atas nama *Representative of The Islamic Republic of Indonesia*. Surat itu diedit oleh wartawan Amerika Serikat, menurut penjelasan Utoh Him pada Ahad, 26 September 2010, di Jakarta. Selain mengirim surat protes kepada berbagai media nasional dan internasional, Cornelis Van Dijk, seorang peneliti Belanda, menegaskan bahwa Hasan Tiro juga mengirim surat protes ke belasan negara Islam, termasuk Kerajaan Belanda. Surat terbuka Hasan Tiro yang dikirim dari New York menggemparkan elite Jakarta seperti petir di siang bolong. Hasan Tiro menyadari risiko dari surat pembaca berisi ancaman tersebut, yaitu kemungkinan dipecat dari pekerjaannya yang mapan serta pencabutan paspor diplomatik yang akan membuatnya diproklamirkan sebagai persona non grata oleh Indonesia. Hasan Tiro juga menyadari bahwa dia akan kehilangan tempat tinggal di Fifth Avenue, New York, yang dekat dengan Markas besar PBB.⁶⁸

Aceh adalah sebuah komunitas yang memiliki sejarah hubungan internasional yang kuat. Kemampuan diplomatik Aceh yang dihormati telah memungkinkan untuk berinteraksi dan menjalin relasi di tingkat dunia. Salah satu

⁶⁸ Muhrizal Hamzah, *“Hasan Tiro Jalan Panjang...”*, hlm. 303-304.

strategi yang digunakan oleh Tgk Hasan Tiro adalah diplomasi internasional, Ia adalah orang yang pandai dalam berbahasa dan menjalin hubungan di kalangan negara-negara internasional. Sehingga mencoba mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional dalam perjuangan Aceh merdeka dan para gerakan Aceh merdeka.⁶⁹

Hasan Tiro sangat memahami bahwa tidak mudah menuju jalan merdeka bagi Aceh. Oleh karena itu, ia mencari pengakuan internasional dan berjuang dengan tema hak menentukan nasib sendiri. Hasan Tiro melakukan lobi internasional dan terus berkampanye tentang “dekolonisasi” Indonesia. Bahkan pada tahun 1980-1990an, Hasan Tiro bergandengan dengan gerakan separatis lain, seperti Timor Timur (Fretilin) dan Republik Maluku Selatan (RMS). Pada 1980an, ketika gerakannya diserang oleh militer, Hasan Tiro membangun kembali gerakan bersenjata di luar Aceh. Pada 1986, dia memilih Libya sebagai markas pelatihan militer. Empat tahun kemudian, dia melatih hampir 800 pemuda Aceh, tidak hanya mengenai keterampilan militer tetapi juga mengenai ideologi dalam perspektif Aceh.⁷⁰

Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita tentukan sendiri. Pengakuan internasional memang penting, namun kemerdekaan sejati adalah keputusan kita sendiri. Hasan Tiro memperjuangkan kemerdekaan Aceh dengan berbagai upaya internasional, termasuk bekerja sama dengan Libya, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai negara lainnya. Hasan Tiro juga berperan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk Harun (63 Tahun), Pasukan GAM Eks Libya, Pada Tanggal 26 Juni 2024.

⁷⁰ Santi Andriyani, “Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh”, *Jurnal ISIP*, Januari 2017, hlm. 14.

penting dalam mendirikan *United Nations Unrepresented Peoples Organization* (UNPO), sebuah organisasi yang mirip dengan PBB namun mewakili bangsa-bangsa yang masih dijajah. Selain mendirikan UNPO, Hasan Tiro juga menjadi mentor bagi perjuangan kemerdekaan di negara-negara lain seperti Moro dan Kosovo. Ketika Wakil Perdana Menteri Kosovo datang ke Aceh, ia menceritakan bahwa Hasan Tiro adalah salah satu yang mengajarkan metode dan strategi untuk mendapatkan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan Hasan Tiro sudah mendapat pengakuan kuat di kancah internasional. Namun, pada masa itu, tidak banyak negara yang merdeka, sehingga tren pengakuan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan masih terbatas.⁷¹ Oleh karena itu, perjuangan internasional oleh Hasan Tiro mencakup berbagai aspek seperti diplomasi, kampanye media, dan kerja sama dengan komunitas internasional serta diaspora Aceh. Semua ini menunjukkan dedikasi dan usaha kerasnya untuk mencapai tujuan kemerdekaan bagi Aceh.

3. Pejuang Keadilan dan Otonomi

Hasan Tiro memperjuangkan hak-hak politik dan otonomi bagi rakyat Aceh. Ia menekankan pentingnya otonomi daerah yang lebih besar bagi Aceh dalam mengatur urusan dalam negeri, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan keuangan. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Suharto, Aceh dijadikan wilayah eksploitasi gas alam dan minyak bumi melalui proyek-proyek multinasional yang dimulai pada era 1970-an. Eksploitasi ini dilakukan oleh

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada tanggal 28 Mei 2024.

pemerintah pusat tanpa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, sehingga kemiskinan di wilayah tersebut menjadi tak terelakkan. Pemilu 1971, yang memberi kemenangan mutlak bagi Golkar dan mengukuhkan legitimasi Suharto, memperburuk keadaan karena Suharto semakin rakus terhadap sumber daya alam Aceh.

Pada masa pemerintahan Suharto, kondisi di Aceh semakin memburuk dengan semakin gencarnya pembangunan industri-industri strategis di wilayah tersebut. Namun, pembangunan ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi rakyat Aceh. Kesejahteraan dan pembangunan yang berarti tidak dirasakan oleh masyarakat lokal, sementara sumber daya alam Aceh terus dikuras. Selain itu, ada kekecewaan dari pemerintah Aceh karena banyaknya orang Jawa yang menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, sebuah fenomena yang sering disebut sebagai kolonisasi Jawa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan tujuan menjaga kelancaran pembangunan dari gangguan masyarakat Aceh yang menentang kebijakan pusat.⁷²

Penemuan ladang gas Arun mendapat perhatian besar dari pemerintah, yang kemudian mengarah pada peresmian PT Arun Natural Gas Liquefaction Co. Oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 September 1978. Kinerja ekspor dari PT Arun sangat tinggi dan berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia pada periode 1990-an.⁷³ Selain itu, kebanyakan para pekerja di perusahaan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa,

⁷² Hany Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh...", hlm. 101

⁷³ Mateus Putra Dinata, "*Lhokseumawe Disebut Sebagai Kota Petro Dollar*", September 2020. Diakses pada tanggal 11 Juli 2024 dari situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/>.

Kalimantan, dan Sulawesi. Selain pegawai pribumi, PT Arun juga mempekerjakan karyawan dari luar negeri.⁷⁴ Tuduhan kepada Hasan Tiro memberontak dengan Indonesia karena tidak mendapatkan tender di proyek PT Arun Blang Lancang Aceh. Hasan Tiro juga menuduh orang-orang Jawa sebagai pelaku neokolonial yang berusaha merebut kekayaan masyarakat Aceh.⁷⁵

Hasan Tiro memperjuangkan Aceh bukan karena PT Arun, melainkan karena ia ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh, mirip dengan kejayaan masa Kerajaan Iskandar Muda (negara bersambung). Hasan Tiro pulang ke Aceh dengan tujuan memperbaiki kondisi hidup masyarakat Aceh. Programnya terkait PT Arun adalah untuk memastikan bahwa keuntungan dari perusahaan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, mengingat PT Arun beroperasi di tanah Aceh dan seharusnya dikelola oleh orang Aceh.⁷⁶

Dalam buku *The Price of Freedoms* Hasan Tiro juga menulis mengalami kesuksesan dalam dunia bisnis. Hasan Tiro berhasil mendapatkan akses dari lingkungan bisnis dan pemerintahan tertinggi di berbagai negara, diantaranya yaitu negara Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara, terkecuali Indonesia karena menghindari dari negara tersebut. Hasan Tiro memiliki hubungan bisnis yang erat dengan 50 perusahaan terkemuka AS di bidang petrokimia, perkapalan, konstruksi, penerbangan, manufaktur, dan industri pengolahan makanan. Selain itu Hasan Tiro juga menjabat sebagai ketua

⁷⁴ Iqbar, "Trees Vegetation Diversity in Pt Arun Nglhousing, Lhokseumawe, Aceh Province", *Jurnal Natural*, Vol.16, No.1, 2016, hlm. 1.

⁷⁵ Hany Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh...", hlm. 102.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman (75 Tahun), Tokoh Masyarakat Tiro, Pada tanggal 18 Mei 2024.

Konsorsium dan telah banyak memimpin delegasi perusahaan Amerika untuk menegosiasikan transaksi bisnis skala besar di Timur Tengah, Eropa dan Asia. Pada saat kunjungan ke Riyadh status sebagai ketua salah satu konsorsium pada tahun 1973, Hasan Tiro bertemu dengan Raja Feisal. Dalam pertemuan ini ia memberikan kepada Raja Feisal dua hadiah, hadiah pertama yaitu potretnya yang dibuat oleh seniman terkenal dengan latar belakang industri Arab Saudi, dan kedua yaitu album prangko bergambar kakek buyut Hasan Tiro, yaitu Al-Malik Tengku Tjhik di Tiro, tujuannya untuk mengingatkan Raja Feisal bahwa meskipun menjadi ketua konsorsium di Amerika. Hasan Tiro masih orang Aceh-Sumatera, dan belum pernah menjadi "orang Indonesia".⁷⁷

Melihat fenomena ini, menjadi jelas bahwa masyarakat Aceh mengalami kemiskinan dan ketidaksejahteraan meskipun daerah Aceh kaya akan sumber daya alam, termasuk penemuan gas alam terbesar di dunia. Hal ini menjadi sumber kemarahan masyarakat Aceh terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah pusat. Penulis membandingkan dengan negara-negara seperti Arab Saudi, yang memiliki sumber daya alam berlimpah seperti minyak, menunjukkan bagaimana pengelolaan yang efektif dari sumber daya alam dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun, di Aceh, meskipun memiliki potensi yang serupa dengan Arab Saudi dalam hal sumber daya alam, masyarakatnya masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan yang layak.

⁷⁷ Tengku Hasan di Tiro, *The Price of Freedoms...*, hlm. 5.

Dalam sebuah teks proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera yang ditulis langsung oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976. Menyatakan,

Kami, rakyat Aceh, Sumatera, yang menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak bersejarah kami atas tanah air kami, dengan ini mendeklarasikan diri kami bebas dan mandiri dari segala kendali politik rezim asing di Jakarta dan rezim asing. Masyarakat Pulau Jawa. Tanah air kita, Aceh, Sumatera, selalu menjadi Negara Berdaulat yang bebas dan merdeka sejak dunia diciptakan.⁷⁸

Mengamati dari teks proklamasi ini semakin jelas bahwa motif perjuangan Hasan Tiro adalah untuk mengembalikan kedaulatan Aceh seperti masa kerajaan Aceh yang berdaulat yang mengatur pemerintahan sendiri dan merdeka atau pisah dari Republik Indonesia. Selain itu, isi dalam teks proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera, Hasan Tiro mengklaim bahwa pengalihan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia adalah sebuah penipuan politik yang mengerikan. Ia juga menolak keberadaan Indonesia sebagai suatu bangsa yang sah. Hasan Tiro juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang dikenal dengan nama Indonesia, baik dari sudut pandang etnologi, filologi, antropologi budaya, sosiologi, maupun temuan ilmiah lainnya. Ia menganggap Indonesia hanyalah sebuah label baru yang diciptakan oleh Belanda untuk menggantikan nama "Hindia Belanda." Label ini, menurut Hasan Tiro, tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah, bahasa, budaya, atau kepentingan bangsa-bangsa di Kepulauan Melayu.⁷⁹

Hasan Tiro menentang sentralisasi kekuasaan yang dianggap merugikan Aceh. Dia ingin Aceh memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya dan

⁷⁸ Tengku Hasan di Tiro, *The Price of Freedoms...*, hlm. 15.

⁷⁹ Tengku Hasan di Tiro, *The Price of Freedoms...*, hlm. 16.

kebijakan di tingkat lokal. Hasan Tiro menekankan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan Aceh dapat dicapai hanya jika semua rakyat Aceh bersatu dan bekerja sama, dengan prinsip "sejajar-sebahu" dan "seiring-selangkah". Menurutnya, kunci utama untuk mencapai hal ini adalah dengan berpikir keras untuk kepentingan saudara dan bangsa Aceh. Rakyat Aceh perlu mengubah pola pikir mereka dan mengutamakan kepentingan Bangsa Aceh dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, adab, dan hukum. Mereka harus mengembangkan pemikiran independen agar bisa membangun Aceh yang lebih baik untuk generasi saat ini dan mendatang. Hasan Tiro menegaskan bahwa solusi untuk kemakmuran bukanlah dengan egoisme kelompok atau individu, melainkan dengan kesadaran akan kepentingan bersama. Hal yang paling penting adalah tidak pernah melupakan nasib rakyat Aceh.⁸⁰

Dalam bukunya "Aceh di Mata Dunia", Hasan Tiro menggambarkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, ekonomi Aceh lebih baik karena Belanda mampu mengatur hasil bumi Aceh dengan lebih baik daripada pemerintah pusat saat ini. Hasan Tiro berpendapat bahwa sekarang Aceh dijajah oleh "seberang lautan" (maksudnya pemerintah pusat di Jakarta) dan hasil bumi Aceh dicuri. Hasan Tiro menekankan bahwa pemerintah pusat tidak mampu mengatur Aceh dengan efisien, sementara Belanda pada masa penjajahannya lebih mampu mengelola ekonomi Aceh.⁸¹

⁸⁰ Teungku Hasan M. di Tiro, *Aceh di Mata Dunia...*, hlm. 99.

⁸¹ Teungku Hasan M. di Tiro, *Aceh di Mata Dunia...*, hlm. 97.

4. Identitas Aceh dalam Perjuangan Hasan Tiro

Identitas Aceh memegang peran sentral dalam perjuangan Hasan Tiro, yang terwujud dalam berbagai aspek budaya, sejarah, agama, dan sosial masyarakat Aceh. Hasan Tiro menggunakan identitas ini sebagai dasar untuk menggalang dukungan bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menegaskan hak Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam buku “Demokrasi Untuk Indonesia” Hasan Tiro mengkritik Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem pemerintahan Soekarno. Menurutnya ideologi Pancasila yang digunakan oleh negara Indonesia adalah tidak berdasarkan pada ideologi rakyat. Menurut Hasan Tiro ideologi Pancasila sebagai dasar negara bukanlah yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena Islam adalah agama yang hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia, 90% rakyat Indonesia masih memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Hasan Tiro menginginkan Islam sebagai dasar ideologi negara.

Dalam sebuah negara demokrasi, filosofi atau ideologi yang diadopsi oleh negara seharusnya mencerminkan filosofi atau ideologi masyarakat yang menjadi basisnya. Jika tidak, ada dua konsekuensi yang mungkin timbul. Pertama, negara tersebut telah melenceng dari prinsip dasar demokrasi. Kedua, negara dan pemerintahannya tidak akan mendapatkan dukungan, loyalitas, dan ketaatan dari warga masyarakat yang telah melahirkan dan mendukungnya. Akibatnya, hal ini dapat mengarah pada keruntuhan negara tersebut.⁸²

Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Aceh dari masa kejayaan Aceh sampai sekarang ini dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh. Tgk.

⁸² Hasan Muhammad Tiro, “*Demokrasi Untuk Indonesia...*”, hlm. 34-36.

Hasan Tiro dan GAM menggunakan simbol-simbol Islam dan retorika keagamaan untuk membangkitkan semangat perjuangan dan menggalang dukungan dari masyarakat Aceh. Islam digunakan sebagai landasan moral dan legitimasi dalam perjuangan gerakan Aceh Merdeka.⁸³ Hasan Tiro dan pendukungnya sering mengacu pada kejayaan kerajaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda sebagai sumber inspirasi. Pada abad ke-17, Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling makmur di Asia Tenggara. Ini menegaskan identitas Aceh sebagai entitas yang pernah mandiri, kuat, dan berdaulat.⁸⁴

Selain mengungkapkan kritik terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Hasan Tiro juga mengarahkan kritik terhadap sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno. Ia menegaskan keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang memastikan setiap suku mendapatkan perlakuan yang adil, kemakmuran, dan kemerdekaan. Hasan Tiro berjuang untuk mewujudkan visi ini di tengah dinamika politik yang kompleks di Indonesia pada masa itu. Dengan demikian, kritiknya tidak hanya terfokus pada aspek keagamaan atau ideologis, tetapi juga pada aspek struktural dan keadilan sosial dalam sistem pemerintahan.

Hasan Tiro menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang telah mendiami wilayah-wilayah tertentu sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam hal ini, ia menentang pembagian wilayah berdasarkan konsep politik yang dibawa oleh penjajah Belanda ataupun keputusan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno. Hasan Tiro berpendapat bahwa

⁸³ Hasil Wawancara dengan Tgk Harun (63 Tahun), Pasukan GAM Eks Libya, Pada tanggal 26 Juni 2024.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman (75 Tahun), Tokoh Masyarakat Tiro, Pada tanggal 18 Mei 2024.

pembagian wilayah harus mempertimbangkan hak historis masing-masing suku bangsa atas daerahnya sendiri. Pembagian wilayah yang tidak memperhatikan hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak suku bangsa dan juga akan mengganggu stabilitas pemerintahan serta merugikan negara secara keseluruhan. Hasan Tiro menekankan praktik pembagian wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno yang dianggap tidak memperhatikan kondisi geografis dan kepentingan suku-suku bangsa di Indonesia. Ia juga menentang pendekatan politik ilmu ukur yang sering kali diadopsi dalam pembagian wilayah, baik oleh pemerintah Belanda maupun pemerintah Soekarno.⁸⁵

Hasan Tiro menganggap bahwa negara kesatuan adalah suatu pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat karena menegakkan struktur pemerintahan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial, politik, ekonomi, sejarah, serta geografi Indonesia. Menurut Hasan Tiro Indonesia adalah negara bersuku bukan negara kesatuan karena Indonesia bukan negara tunggal melainkan negara yang mempunyai beragam suku. Narasi di atas dapat disimpulkan bahwa Hasan menekankan pentingnya pembagian wilayah pemerintahan yang menghormati sejarah dan keberagaman etnis di Indonesia sebagai dasar untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan berkeadilan.⁸⁶

Pemikiran Hasan Tiro telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pertama-tama, ia mendorong bangkitnya nasionalisme di kalangan orang Aceh. Pemikiran dan retorika Hasan Tiro

⁸⁵ Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia...*, hlm. 34-36.

⁸⁶ Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia...*, hlm. 81.

menyoroti sejarah Aceh sebagai sebuah negara berdaulat yang eksis jauh sebelum pembentukan Indonesia.⁸⁷ Hasan Tiro mengatakan bahwa Aceh merupakan sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka, hal ini dinyatakan dalam buku “Atjeh Bak Mata Donja” dan kutip kembali dalam buku “Konsep Politik Hasan Tiro dalam Melihat Aceh”. Berikut adalah isi teks narasi dari Hasan Tiro:

Geutanyoe Atjeh na saboh bangsa ateueh donja lagee bangsa-bangsa laen tjit: geutanyoe na Naggroe droeteuh: naggroe Atjeh, geutanyoe na bansa droeteuh: bansa Atjeh, geutanyoe na riwayat droeteuh: seudjarah Atjeh, njang ka geupeugot le endatu teuh. Njoe keuh pusaka njang handjeuet sagai tatuwo, uroe dan malam, beungoh-suepot, pat njang taduek, boh bak gaki seulawah, boh bak putjak geureundong, boh bak bineh Kuta Aneuk Galong, boh di Ierupa atawa di Amerika. Naggroe Atjeh njoe na keuh ibarat saboh kuta raja, njang ka geupeudong le endatu geuntanjoe turon-teumuron meuribee thon njang ka u likot keu teupat hudep, keu teupat matee dan keutempat meuneu'en geuntanjoe aneuk-tjutjo geuh. Kuta njang tjeudaih that njoe, njang meuasoe blang idjo, gunong meu-tjukeh awan, ban silingka laot masen. Di teungoh laot Tawa, ka geupeudong dan ka geupeutheun meuribee thon nibak djirampaih le bangsa laen, Timu Barat, Tunong Baroh, boh dengan djalan djiplomasi, boh deungon geumuprang. Hana jum njang han geutem bajeue, hana sosah njang han geutem tanggong, hana phet njang han geutem rasa, bah that pih njawoeng geutem bri deungon suka rela bak peulara tanoh mulia, naggroe pusaka njoe".⁸⁸

Selain itu, Hasan Tiro menekankan bahwa Aceh pernah memiliki kekuasaan yang luas, mencakup hampir seluruh Sumatera dan wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Malaysia. Argumennya menegaskan bahwa kekuasaan yang sebesar itu tidak pantas dijadikan hanya sebuah daerah di dalam suatu negara lain. Dengan demikian, pemikiran ini memperkuat kesadaran akan identitas nasional Aceh yang independen. Kedua, pemikiran Hasan Tiro juga memicu penentangan terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Orang Aceh merasa bahwa pemikiran dan

⁸⁷ Monika Sari, “Hasan Tiro: History of Aceh...”, hlm. 33.

⁸⁸ Fajarwati, *Konsep Politik Hasan Tiro...*, hlm. 3-4.

tindakan Hasan Tiro sesuai dengan realitas dan kondisi yang ada di Aceh. Mereka merasa bahwa Jakarta telah mengkhianati potensi alam dan kekhasan budaya Aceh dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Hal ini memperkuat dukungan terhadap gerakan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar bagi Aceh.⁸⁹

Secara keseluruhan, pemikiran Hasan Muhammad di Tiro telah memberikan landasan bagi gerakan nasionalisme Aceh serta memperkuat perlawanan terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Dengan menyoroti sejarah dan identitas Aceh yang independen, pemikiran ini memengaruhi pandangan masyarakat Aceh terhadap posisi politik dan kebudayaannya dalam konteks Indonesia yang lebih luas.

5. Penolakan Terhadap Kekerasan

Meskipun GAM terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Indonesia, Hasan Tiro menegaskan bahwa perjuangan GAM bukan untuk kekerasan, tetapi untuk mencapai kedaulatan politik secara damai. Kegagalan Hasan Tiro menatap ke tanah kelahiran sudah di ubun-ubun. Ia merasa perlu berbuat sesuatu untuk menghentikan kekerasan. Kegagalan yang mendalam merasuki pikiran Hasan Tiro ketika ia memandang tanah kelahirannya yang terperosok dalam gelombang kekerasan dan penderitaan. Dalam kedalaman pikirannya, ia menyadari bahwa situasi tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Suara-suara penderitaan rakyatnya memanggilnya untuk bertindak. Hasan Tiro merasakan urgensi untuk menghentikan spiral kekerasan yang menghancurkan komunitasnya. Dia tahu

⁸⁹ Monika Sari, "Hasan Tiro: History of Aceh...", hlm. 33-34.

bahwa waktu untuk bertindak adalah sekarang, bahwa setiap detik yang berlalu adalah peluang hilang untuk mencegah lebih banyak penderitaan.⁹⁰

Ketika Hasan Tiro tinggal di New York bekerja sebagai perwakilan Indonesia, terjadi tragedi Pulot Cot Jeumpa, pembantaian warga oleh TNI di Gampong Pulot Cot Jeumpa, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Tragedi ini menjadi puncak kemarahan Hasan Tiro, yang kemudian memprotes dengan mengirim surat yang sangat keras kepada Ali Sastroamijoyo, Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat.⁹¹

Hasan Tiro mengancam keras tentang pelanggaran HAM berat di Aceh, Pada periode pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, terjadi tragedi yang mengguncang hati dan mencoreng harga diri kemanusiaan. Dalam upaya untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemerintah Indonesia menerapkan operasi militer yang dikenal dengan sandi Operasi Jaring Merah dari tahun 1989 hingga 1999. Namun, upaya ini menyisakan jejak kekejaman yang tak terlupakan. DOM menyebabkan dampak yang merenggut banyak nyawa tak berdosa serta mengorbankan ribuan perempuan dan anak-anak. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Aceh, termasuk aksi genosida, pembantaian massal, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembakaran harta benda. Camp-camp tentara seperti Rumoh Geudong di Aceh Pidie dan Rancong di Aceh Utara menjadi saksi bisu atas kekejaman yang terjadi. Mereka menjadi tempat

⁹⁰ Muhrizal Hamzah, "*Hasan Tiro Jalan Panjang...*", hlm. 303.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

penyekapan, penyiksaan, dan bahkan tempat pemakaman bagi warga Aceh yang dituduh sebagai anggota GAM.⁹²

6. Akhir Dalam Perjuangan Hasan Tiro

Sejarah mencatat bahwa rakyat Aceh tidak dapat ditaklukkan oleh Belanda dengan cara militeristik. Bagi rakyat Aceh, perang melawan Belanda merupakan perang suci "*jihad fisabilillah*," yang berarti jika mati, mereka akan disebut syahid. Hal ini didorong oleh semangat aqidah Islamiyah yang sangat kuat dalam pemahaman rakyat Aceh. Oleh karena itu, perang ini melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan.⁹³ Pada tahun 1873 Belanda menyerang daerah Aceh di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R Kohler. Padahal Aceh salah satu daerah merdeka yang tidak boleh dilanggar kedaulatannya.⁹⁴ Menurut Munawar Liza Zainal, pada tahun 1800-an ada satu perjanjian antara Aceh dan Inggris namanya yaitu *Landon Trety* (Traktat London), isi dalam Traktat London bahwa Aceh tidak boleh diserang oleh negara lain kalau diserang oleh negara lain maka Inggris yang membantu Aceh. itu adalah salah satu perjanjian antara Aceh dan Inggris. Kemudian pada tahun 1870-an Traktat London ini dibatalkan, karena dibuat yang baru namanya yaitu Traktat Sumatra. Dalam Traktat Sumatra mengatakan bahwa jika Belanda menyerang Aceh maka Inggris

⁹² Ajidar Matsyah dan Umar Bin Abdul Aziz, "*Pasang Surut Hubungan Aceh-Jakarta Pasca Mou Helsinki*", hlm. 269-270.

⁹³ Abrar Muhammad Yus, "Pemikiran Dan Tindakan Politik Hasan Tiro...", hlm. 1.

⁹⁴ Jihan Fahira, "Kebijakan Politik Kolonial Belanda...", hlm. 2.

tidak turun membantu Aceh. sehingga menyebabkan belanda berani menyerang Aceh pada tahun 1873 dan aceh diserang sebagai negara berdaulat.⁹⁵

Akibat yang paling jelas dari peperangan melawan Belanda adalah hilangnya kemerdekaan selama 57 tahun. Aceh dijajah oleh Belanda selama 31 tahun (1911-1942), oleh Jepang selama 3 tahun (1942-1945), dan oleh Jawa selama 23 tahun (1945-1968). Penjajahan oleh Jawa bukan karena kekalahan perang, tetapi karena tipu daya setelah kekalahan Jepang. Aceh tidak memerdekakan diri sendiri, melainkan memilih untuk bergabung dengan Jawa. Hal ini terjadi karena kehilangan pemahaman akan sejarah dan hak sebagai bangsa yang mulia. Perang Aceh melawan Belanda menghabisi para pemimpin Aceh dan memutuskan hubungan antar generasi yang selalu merdeka.⁹⁶

Sebagai contoh, Irlandia yang merdeka kembali setelah dijajah oleh Inggris selama 800 tahun. Belanda juga pernah dijajah oleh Spanyol, Prancis dan Jerman, akhirnya Belanda juga kembali merdeka. Polandia yang merdeka setelah dipecah belah oleh Rusia, Jerman dan Austria hingga empat kali. Oleh karena itu, Hasan Tiro menjelaskan bahwa kemerdekaan Aceh yang hilang selama 57 tahun bukanlah sesuatu yang tidak dapat kita kembalikan. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi mencari ke sana-kemari untuk menemukan falsafah hidup yang lebih mulia dan lebih indah dari apa yang telah diwariskan oleh éndatu kita. Falsafah hidup ini telah diwariskan, ditulis dengan darah di atas tanah yang mulia ini, dari pinggiran pantai hingga ke puncak gunung yang ditutupi awan. Falsafah hidup itu adalah bahwa

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

⁹⁶ Teungku Hasan M. di Tiro, *Aceh di Mata Dunia...*, hlm. 85.

hidup Bangsa Aceh di dunia ini bukan sekadar hidup, melainkan hidup yang harus dijalani dengan kemuliaan. Hidup mulia berarti hidup merdeka, bukan hidup sebagai budak bangsa lain. Merdeka adalah asal dari sebuah kemuliaan, kemakmuran, dan kemajuan. Jika kita sanggup memahami falsafah hidup Aceh, maka bangsa Aceh akan selamat dunia akhirat, mulia di dunia dan di mata Allah. Falsafah hidup Aceh ini telah tertanam sebagai ilmu (rasionalitas) bagaimana mengurus dirinya, yang lebih dari bangsa-bangsa lain di sekeliling Aceh.⁹⁷

Perjuangan Hasan Tiro sampai saat ini belum berakhir karena yang diperjuangkan oleh Wali adalah Aceh merdeka dan Aceh berdaulat, berhenti sekarang karena adanya perdamaian pasca tsunami. Jadi perkiraanya, orang Aceh masih berpikir bahwa Aceh ini akan lebih sejahtera seandainya Aceh merdeka, tetapi perjuangan itu tidak selalu dengan senjata melainkan adanya ide Aceh itu harus mandiri, harus merdeka, dan ide ini harus dipertahankan karena ideologi ini tidak bisa direpresif, artinya tidak bisa dipadamkan. Terkait dengan Aceh sekarang bisa kita lihat bahwa aceh sekarang berbelit-belit di dalam negara ini. Hal ini bukan Aceh saja yang merasakan ini semua provinsi bisa merasakan keadaan sekarang. Ketidakjelasan pemerintahan pusat dan daerah, tidak jelas terkait hukum dan etik. Hukum berubah-ubah, Terkadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum, jika sesuai hukum tetapi secara etika tidak sesuai. Kondisi-kondisi seperti ini terjadi di Indonesia, makanya hal-hal seperti inilah ketidaknyamanan masyarakat dan

⁹⁷ Teungku Hasan M. di Tiro, *Aceh di Mata Dunia...*, hlm. 89.

Aceh akan tetap terpuruk jika kondisi seperti ini terus tidak ada kejelasan untuk membangun Aceh.⁹⁸

Namun kenyataannya akhir dari perjuangan Hasan Tiro adalah berhasil menyepakati mengarah perdamaian melalui perjanjian Helsinki 2005. Berikut adalah hasil-hasil utama dari negosiasi yang dilakukan oleh delegasi Indonesia dan delegasi GAM:

1. Perjanjian Damai Helsinki (2005): Salah satu hasil paling signifikan dari perjuangan dan negosiasi yang dilakukan oleh GAM adalah Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade antara GAM dan pemerintah Indonesia.
2. Otonomi Khusus bagi Aceh: Sebagai bagian dari perjanjian damai, Aceh diberi status otonomi khusus yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini termasuk hak untuk membentuk partai politik lokal, mengelola sumber daya alam, serta menjalankan hukum syariah Islam yang diakui secara hukum.
3. Penghapusan Tuntutan Merdeka: Dalam perjanjian tersebut, GAM setuju untuk menghapus tuntutan kemerdekaan penuh bagi Aceh, sebagai gantinya mendapatkan otonomi yang luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kompromi yang penting yang memungkinkan tercapainya perdamaian.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

4. Penarikan Pasukan Militer: Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah penarikan sebagian besar pasukan militer Indonesia dari Aceh. Ini dilakukan sebagai langkah untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi perdamaian di wilayah tersebut.
5. Reintegrasi Mantan Pejuang GAM: Mantan pejuang GAM diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan diberikan program reintegrasi dan bantuan ekonomi. Ini termasuk amnesti bagi anggota GAM, serta bantuan untuk mengembalikan mereka ke kehidupan sipil.
6. Pembangunan dan Rekonstruksi: Perjanjian Helsinki juga membuka jalan bagi upaya pembangunan dan rekonstruksi Aceh, terutama setelah bencana tsunami pada 2004. Banyak sumber daya yang dialokasikan untuk membangun kembali infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.⁹⁹

Perjanjian Helsinki merupakan puncak dari berbagai upaya negosiasi dan diplomasi yang dilakukan oleh Hasan Tiro dan pemimpin GAM lainnya. Ini dianggap sebagai model sukses resolusi konflik yang melibatkan otonomi khusus dan rekonsiliasi damai

4.3 Perspektif Kombatan GAM di Wilayah Pidie Terhadap Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh

Babak baru dalam perjalanan politik Indonesia pasca kemerdekaan menuai berbagai persoalan. Salah satu isu yang sangat mengganggu stabilitas negara adalah munculnya gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan ini timbul karena adanya

⁹⁹ Risky Novialdi, "Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki Catatan atas Tahap Penjajakan (Trust Building) Hingga Pencapaian Kesepakatan Damai (MoU)", *Jurnal Culture, Economy, and Sosial Changes*, 1 Januari 2017, hlm. 11-115.

ketidakselarasan antara keinginan rakyat di suatu daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Melihat fenomena ini, tentunya pemerintah pusat perlu melakukan upaya-upaya strategis untuk mengatasi gerakan-gerakan yang dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan nasional. Gerakan separatis dapat diartikan sebagai upaya untuk memisahkan diri dari suatu kesatuan negara, yang sering kali menimbulkan konflik dan membawa konsekuensi merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu gerakan yang menarik perhatian banyak pihak, baik nasional maupun internasional, dan dianggap sebagai gerakan separatis adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Gerakan ini berpusat di Provinsi Aceh dan telah terlibat dalam konflik dengan pemerintah pusat Indonesia.¹⁰⁰

Konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh mencerminkan ketidakadilan, di mana terdapat ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan di berbagai bidang, terutama dalam hal pembangunan. Ketidakselarasan ini berdampak negatif, menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan tingginya tingkat kesenjangan sosial di Aceh.¹⁰¹ Pada awalnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah organisasi yang diproklamasikan secara terbatas. Deklarasi GAM oleh Hasan Tiro dan beberapa anggotanya dilakukan secara diam-diam di sebuah kamp kedua yang terletak di Bukit Gunung Halimon, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie, pada tanggal 4 desember 1976, inisiator Gerakan Aceh Merdeka Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Republik

¹⁰⁰ Eka Auliana Pratiwi, "Campur Tangan Asing di Indonesia...", hlm. 83.

¹⁰¹ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005", *Jurnal Al-Turās*, Vol. XIX No. 1, Januari 2013, hlm. 50.

Indonesia. Di awal masa berdirinya, GAM menggunakan nama resmi AM, yang merupakan singkatan dari Aceh Merdeka.¹⁰² GAM lahir sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik, yang memicu bangkitnya nasionalisme etnis Aceh. Organisasi ini dikenal juga dengan nama ASNLF (*Aceh Sumatra National Liberation Front*) ketika berhubungan dengan dunia internasional.¹⁰³

Bendera GAM yang dirancang oleh Hasan Tiro terdiri dari bulan sabit dan bintang putih serta dua garis hitam yang mengapit satu garis putih dengan latar belakang merah. Pada mulanya, bendera ini hanya menampilkan bulan sabit yang merupakan simbol bendera Kerajaan Aceh. Pada tahun 1976, Hasan Tiro menambahkan dua garis hitam di atas dan di bawah sebagai penghormatan kepada para syuhada yang telah mempertahankan Aceh dari berbagai penjajahan. Makna dari bendera GAM adalah sebagai berikut:

1. Warna merah melambangkan jiwa kepahlawanan dan keberanian rakyat dalam memperjuangkan kebenaran.
2. Dua garis merah melambangkan perjuangan suci.
3. Garis hitam melambangkan duka cita perjuangan rakyat Aceh.
4. Bulan sabit melambangkan lindungan cahaya iman.
5. Bintang lima melambangkan rukun Islam.¹⁰⁴

¹⁰² Ikkal Husni dkk, "Aceh dan Perdamaian", *Jurnal Proceedings of International Conference on Islamic Studies "Islam & Sustainable Development"*, Vol. 3, No. 1, Februari 2020, hlm. 429.

¹⁰³ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka...", hlm. 51.

¹⁰⁴ Muhrizal Hamzah, "Hasan Tiro Jalan Panjang...", hlm. 504.

a. Perkembangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Dalam perkembangannya, GAM telah melalui tiga fase penting. Fase pertama berlangsung dari tahun 1976 hingga 1989, di mana pada masa ini GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya didominasi oleh kaum terpelajar. Operasi yang dilakukan untuk melawan GAM pada periode ini didominasi oleh TNI-AD di bawah Kodam I/Bukit Barisan.¹⁰⁵ Pihak keamanan pemerintah berhasil mempersempit ruang gerak dan melumpuhkan gerakan GAM dengan pendekatan militeristik. Akibatnya, sebagian pemimpin GAM terbunuh, ditangkap, dan ada pula yang berhasil melarikan diri ke luar negeri. Pada fase ini, operasi militer belum berhasil mendekonstruksi kesadaran berbangsa orang Aceh. Namun, tindakan tersebut mulai menciptakan embrio gerakan yang lebih radikal dan matang. Pada kurun waktu 1976 sampai 1989, untuk mendukung kampanye anti-pemberontakan, tentara Indonesia melakukan pengejaran dan serangan bersenjata serta pencarian (*sweeping*) dari rumah ke rumah terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka di daerah yang diduga sebagai basis GAM.¹⁰⁶

Fase kedua berlangsung dari 1989 hingga 1998, yang lebih dikenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Fase ini dimulai ketika pada tahun 1989, kaum gerilyawan GAM yang telah melalui pendidikan militer di Libya sejak tahun 1986 muncul kembali di Aceh, disusul oleh konsolidasi struktur komando GAM di Aceh.¹⁰⁷ Menurut Munawar Liza Zainal (anggota AM), Hasan Tiro adalah ketua Al-Masabah Al-Islamiyah salah satu

¹⁰⁵ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka...", hlm.56.

¹⁰⁶ Eka Auliana Pratiwi, "Campur Tangan Asing di Indonesia...", hlm. 86.

¹⁰⁷ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka...", hlm. 56-57.

organisasi NGO (*Non Governmental Organization*) internasional yang mengumpulkan perlawanan-perlawanan di beberapa negara seperti Mozambik, Timur-Timur, Kolombia, Pattani, dan Moro. Semua negara ini dikumpulkan oleh Hasan Tiro kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Libya dan pemerintahan Libya yang membiayai untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Jadi bukan Aceh saja, ada beberapa negara lain yang pergi ke Libya pada masa itu. Jadi negara-negara yang sedang melawan penjajahan di bantu oleh Libya pada saat itu.¹⁰⁸

Salah satu pasukan Eks Libya yaitu Tgk Harun, menceritakan pengalamannya pada saat berangkat berlatih di Libya. Keberangkatan pasukan Eks Libya dimulai dari Aceh ke Malaysia, lalu singgah di Malaysia, mereka difasilitasi oleh pekerja dan pengusaha asal Aceh yang berada di Malaysia. Selanjutnya, atas bantuan dari Malik Mahmud, sebagai warga negara Singapura, pasukan Eks Libya berangkat melalui Singapura dan singgah di Belanda selama 20 hari. Dari Belanda, mereka melanjutkan perjalanan ke Kuwait dan singgah selama 9 hari. Setelah 9 hari di Kuwait, mereka langsung menuju Libya, tepatnya di ibu kota Libya pada saat itu.¹⁰⁹

Pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia kemudian mengambil kebijakan yang sangat militeristik dengan menggelar operasi Jaring Merah dan memberikan status Daerah Operasi Militer (DOM). Pada masa DOM, pasukan yang ditugaskan ke wilayah Aceh yang bergolak terdiri dari 12 kompi satuan organik dari Pangdam

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk Harun (63 Tahun), Pasukan GAM Eks Libya, Pada Tanggal 26 Juni 2024.

Bukit Barisan, dibantu oleh Satgas Intelijen (Kopassus). Pasukan yang dikirim untuk mengamankan wilayah tersebut mengalami penyimpangan dari tugas mereka seharusnya. Pemberlakuan Daerah Operasi Militer untuk mengatasi GAM menelan banyak korban dan diwarnai dengan tindak kekerasan terhadap rakyat Aceh. Dalam menjalankan operasinya, pasukan TNI tidak berusaha mencari simpati dari rakyat Aceh, melainkan mempertontonkan arogansi yang sangat menyakiti hati rakyat, seperti pengusiran penduduk, pemukulan, pembunuhan, hingga pemerkosaan.¹¹⁰

Salah satu metode kejahatan kemanusiaan yang terkenal pada masa Orde Baru adalah pembunuhan misterius (Petrus), yang merupakan bagian dari operasi militer TNI di Aceh pada awal masa DOM. Metode ini dikenal sebagai shock therapy, yang bertujuan untuk menciptakan rasa takut di masyarakat dan menarik dukungan mereka terhadap GAM. Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur adalah wilayah yang paling menderita akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Kekerasan oleh TNI/ABRI memperumit permasalahan dan memicu kemarahan rakyat Aceh. Ketidakmampuan aparat keamanan membedakan antara rakyat biasa, GPK, dan GAM, serta tindakan sewenang-wenang tanpa memperhatikan prosedur hukum, menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Aceh. Selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer, ada dua pos satuan taktis yang paling terkenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kuburan massal, yaitu Rumoh Geudong di Pidie dan Rancong di Aceh Utara.¹¹¹

¹¹⁰ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka...", hlm.57.

¹¹¹ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka...", hlm 61.

Dalam fase ketiga pasca-1998, Aceh mengalami perkembangan yang signifikan dalam dinamika politik dan perjuangan kemerdekaan. Meskipun status DOM telah dicabut, kekerasan masih menjadi bagian dari penanganan pemerintah terhadap GAM dan pendukungnya. Kehadiran GAM semakin diperkuat oleh semangat nasionalisme Aceh yang tumbuh di kalangan rakyat, terutama di daerah yang paling menderita selama masa DOM. Pada tahap ini, gerakan pro-kemerdekaan dipimpin oleh mahasiswa, dengan salah satu tujuan utamanya adalah menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama DOM. Tiga aspirasi utama masyarakat Aceh - merdeka, referendum, dan otonomi khusus mencerminkan kompleksitas politik di wilayah tersebut. Meskipun aspirasi-aspirasi ini hadir, yang paling terlihat dalam perjuangan adalah tuntutan untuk kemerdekaan yang diwakili oleh GAM, serta upaya referendum yang dipimpin oleh kelompok sipil, khususnya aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).¹¹²

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengalami perkembangan yang signifikan. Senjata yang dimiliki oleh GAM semakin bertambah seiring waktu. Selain itu, jumlah anggota GAM juga terus meningkat, menunjukkan semakin besarnya dukungan dari masyarakat Aceh terhadap perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Perkembangan ini mencerminkan ketidakpuasan yang semakin meluas di kalangan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia dan keinginan yang kuat untuk meraih kemerdekaan.¹¹³

¹¹² Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka...", hlm. 62.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bahktiar Abdullah (46 Tahun), Panglima Sagoe/ketua KPA Pidie periode 2017-2022, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

b. Upaya Perdamaian GAM dan RI

Sebelum perjanjian Helsinki yang terjadi pada tahun 2005, penyelesaian konflik Aceh dominan menggunakan pendekatan militeristik dengan slogan “tumpas habis sampai ke akar-akarnya dan pertahankan buminya.” Pendekatan ini telah dijalankan sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 2004 (sekitar 59 tahun). Artinya, pendekatan militeristik telah diterapkan sejak presiden pertama hingga presiden keenam, mulai dari Soekarno, Suharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun akhirnya perjanjian Helsinki berhasil dicapai pada era Susilo Bambang Yudhoyono.¹¹⁴ Sebelum proses menuju perundingan Helsinki, telah terdapat beberapa perundingan sebelumnya, di antaranya:

1. Upaya DOM oleh Soeharto dan permintaan maaf oleh BJ Habibie serta mensejahterakan rakyat Aceh

Pada masa pemerintahan Soeharto, Pemerintah Pusat berusaha menangani konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan menerapkan kebijakan militer, salah satunya melalui pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) pada Mei 1989. Kebijakan ini bertujuan untuk menumpas gerakan pengacau keamanan di Aceh, yang saat itu berkembang menjadi kawasan industri penting namun pembangunan diabaikan. Eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah dan tindakan represif TNI terhadap rakyat Aceh memicu perlawanan dari masyarakat. Selama periode DOM, banyak rakyat Aceh mengalami penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan, dengan Kabupaten Pidie menjadi daerah yang paling menderita karena dianggap sebagai markas GAM. Kekejaman yang dilakukan oleh TNI,

¹¹⁴ Ajidar Matsyah dkk, “Pasang Surut Hubungan Aceh-Jakarta...”, hlm. 269-270.

seperti pembunuhan di depan keluarga, penyiksaan fisik, dan perlakuan kejam lainnya, menyebabkan penderitaan yang mendalam. Upaya stabilisasi keamanan oleh pemerintah ini justru menjadi pelanggaran HAM serius, di mana terjadi pembantaian tanpa proses peradilan yang adil.¹¹⁵

Setelah pencabutan DOM, Presiden B.J. Habibie membatasi militer dalam melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas GAM. Menurut Habibie, upaya tersebut sia-sia karena GAM akan terus membalas serangan-serangan militer. Pada masa pemerintahan Habibie, diupayakan penyelesaian masalah Aceh melalui penerbitan Keppres No. 74/M Tahun 1999 tentang pembentukan tim penasihat Presiden untuk urusan Aceh dan Keppres No. 97/M Tahun 1999 yang memberikan mandat kepada tim tersebut untuk mengusulkan berbagai cara dan langkah yang perlu diambil oleh Presiden dalam menyelesaikan masalah Aceh. Salah satu langkah signifikan yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah membebaskan pers. Kebijakan ini memungkinkan pers untuk melaporkan aksi-aksi militer secara lebih bebas. Akibatnya, banyak organisasi swadaya masyarakat dibentuk dengan tujuan meminta ganti rugi atas kekejaman yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil selama periode DOM.

Status DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Namun, bukan malah membaik, keadaan semakin kisruh dan wilayah konflik pun semakin meluas. Pada masa DOM, konflik hanya terjadi di tiga kabupaten, tetapi pasca DOM,

¹¹⁵ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka Solusi, Harapan, dan Impian*, (Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI, 2001), hlm. 55-56.

konflik menyebar ke sembilan kabupaten. Gerakan pasca DOM ini dimotori oleh mahasiswa dengan salah satu agenda utama mereka adalah kemerdekaan. Tuntutan yang dibuat oleh mereka sebenarnya adalah strategi agar Pemerintah memperhatikan mereka, karena tuntutan mereka atas pengadilan korban-korban DOM tidak diindahkan dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, gerakan ini semakin meluas dengan dua tuntutan utama adalah merdeka atau referendum.¹¹⁶

2. Perjanjian damai tahun 2000 (jeda kemanusiaan dan COHA)

Meskipun tidak ada inisiatif perdamaian seperti itu di bawah pemerintahan Habibie, pemerintahan baru penggantinya, Abdurrahman Wahid (Gusdur), memulai pertemuan penjajakan dengan GAM untuk menemukan penyelesaian damai melalui negosiasi. Presiden Wahid akhirnya mendatangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang baru didirikan di Swiss, Henry Dunant Centre (HDC), sebagai mediator pihak ketiga. Kegiatan HDC, baik di bawah pemerintahan Wahid maupun penerusnya, Megawati Sukarnoputri, menghasilkan dua inisiatif perdamaian besar. Yang pertama adalah Jeda Kemanusiaan (yang secara resmi disebut pemahaman bersama untuk Jeda Kemanusiaan di Aceh), yang ditandatangani di Swiss pada tanggal 12 Mei 2000. Tiga komite gabungan dibentuk untuk memantau dan memverifikasi berakhirnya kekerasan dan distribusi bantuan kemanusiaan berdasarkan perjanjian tersebut, dan tiga bulan pertama cukup menjanjikan seiring dengan berkurangnya kekerasan.

¹¹⁶ Khairunnisa Maulida, "Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI), *Skripsi*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 31-32.

Ketika kekerasan antar pihak kembali terjadi dan negosiasi menemui jalan buntu, COHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) ditinggalkan. Puncak kegagalannya adalah ketika Pemerintah Indonesia mengumumkan status darurat militer untuk Aceh, dan kendali atas provinsi tersebut serta entitas pemerintahannya berada di bawah kewenangannya. Pada saat perdamaian jeda kemanusiaan dan COHA gagal dan kekerasan antara pemerintah Indonesia dan GAM kembali terjadi. Bagian ini berpendapat bahwa kurangnya pengaruh dan kredibilitas politik HDC, serta hubungan sipil-militer yang buruk di bawah pemerintahan Habibie, Wahid, dan Sukarnoputri memungkinkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) muncul sebagai perusak perdamaian.¹¹⁷

3. Perdamaian Era Megawati

Megawati diangkat menjadi presiden kelima Republik Indonesia oleh MPR pada tanggal 23 Juli 2003, menggantikan presiden Abdurrahman Wahid yang dilengserkan oleh MPR karena alasan kesehatan. Pada tanggal 26 Juli, Hamzah Haz diangkat menjadi wakil presiden. Dalam pidatonya, Megawati menyatakan, "*kalau Cut Nyak (gelar bangsawan Aceh yang dilekatkan kepadanya) menjadi presiden tidak akan membiarkan setetes darah pun tumpah di bumi Aceh Serambi Mekkah.*" Tujuh belas hari setelah dilantik, Megawati menandatangani Undang-Undang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal sebagai UU Nomor 18 Tahun

¹¹⁷ Evan A. Laksmana, "Containing Spoilers: Civil-military relations and third parties in the post-Suharto Aceh peace initiatives" *Paper Asia Security Initiative Policy*, Series no. 25, September 3, 2013, hlm. 10.

2001. Undang-undang ini dipaksakan kepada GAM sebagai solusi akhir penyelesaian konflik di Aceh.¹¹⁸

Setelah CoHA dianggap gagal mengakhiri konflik Aceh, kondisi keamanan di Aceh semakin memburuk. Berbagai pihak mendesak agar RI dan GAM kembali ke meja perundingan, yang akhirnya menghasilkan perundingan Tokyo. Perundingan ini sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan CoHA. Namun, masalah yang dibahas terlalu kompleks, dan kedua belah pihak saling menyalahkan atas kegagalan CoHA. Dalam perundingan tersebut, pihak RI tetap mendesak GAM agar menerima tawaran otonomi khusus sebagai solusi akhir, sementara GAM bersedia menerimanya hanya sebagai titik awal, bukan sebagai solusi akhir. Dalam situasi tegang ini, Hamzah Haz menegaskan bahwa jika dalam dua bulan GAM belum menyerahkan senjatanya, pemerintah akan memberlakukan operasi militer, yang didukung oleh TNI. Dalam rapat-rapat kabinet, selalu muncul pernyataan bahwa jika GAM tidak menerima otonomi, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

Perundingan untuk menyelamatkan CoHA mengalami tarik ulur. Pemerintah RI awalnya menawarkan perundingan di Jakarta pada tanggal 23-25 April 2003, namun pihak GAM menolak dengan alasan tidak ada jaminan keamanan. Pemerintah kemudian menawarkan Malaysia, Brunei Darussalam, atau Singapura sebagai lokasi alternatif, tetapi GAM tetap menginginkan perundingan di Jenewa dan meminta penundaan hingga tanggal 27 April. Hal ini membuat

¹¹⁸ Ajidar Matsyah, *Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar'iyah)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), hlm. 137.

Bambang Susilo Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam, marah. Keadaan semakin genting ketika ketua MPR, Amien Rais, menuduh HDC sebagai pembuat masalah dan berpihak pada GAM. Amien Rais mengatakan, *"Menurut saya, HDC tidak usah dibuang ke laut, tetapi cukup diucapkan terima kasih karena telah menginjakkan kakinya di tanah rencong."* Ia juga menambahkan, ketua HDC itu minum kopi bersama dengan Hasan Tiro dan duduk bersuka ria dengan GAM. Jadi, mana mungkin HDC berpihak kepada kita, karena mereka teman akrab dan pasti membela GAM".¹¹⁹ Menurut Megawati, kebijakan yang ia buat tidak mendapat tanggapan positif dari GAM. Sebaliknya, GAM memanfaatkan periode tenang ini untuk merekrut anggota baru dan menyerukan kemerdekaan Aceh. Suasana politik semakin memanas.¹²⁰

Dalam suasana yang penuh ketegangan tersebut, pemerintah RI bersiap-siap untuk melancarkan operasi militer besar-besaran di Aceh guna memberantas GAM hingga ke akar-akarnya. Pemerintah menetapkan batas waktu kepada GAM, yaitu 12 Mei 2003, untuk menerima CoHA dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika batas waktu itu habis, keadaan genting di Aceh dipublikasikan, memberitakan bahwa perang besar akan segera pecah. Namun, pihak internasional, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia, mendesak baik GAM maupun pemerintah RI untuk melanjutkan perundingan. Kofi Annan bahkan menghubungi langsung Presiden

¹¹⁹ Ajidar Matsyah, *"Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh..."*, hlm. 138.

¹²⁰ Khairunnisa Maulida, *"Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian..."*, hlm. 40.

Megawati untuk meminta agar pemerintah bersedia kembali berunding dengan GAM.¹²¹

Pada akhirnya, pemerintah dan GAM sepakat untuk berunding di Tokyo pada 17-18 Mei 2003. Dalam perundingan ini, Pemerintah Pusat menetapkan tiga syarat, yakni bahwa GAM harus mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menerima otonomi yang telah diatur oleh pemerintah, dan menyerahkan senjata. Menurut GAM, persyaratan yang diajukan oleh pemerintah terlalu berat karena akan berarti pengakuan atas kekalahan mereka dan pembubaran organisasi.¹²²

Di sisi lain, TNI mengambil tindakan sepihak dengan mengirim pasukan khusus ke Aceh dan melancarkan serangan terhadap markas-markas GAM serta menangkap orang secara sewenang-wenang. Di antara yang ditangkap adalah juru runding GAM, Sofyan Ibarahim Tiba, dan Tgk. Amri bin Abdul Wahab, yang ditangkap di bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Banda Aceh, saat hendak menuju ke Tokyo. Tindakan ini menyebabkan Megawati dianggap membiarkan TNI bertindak semena-mena di Aceh. Kondisi ini menjadi alasan bagi GAM untuk menolak tawaran pemerintah RI dalam perundingan di Tokyo. Akhirnya, perundingan di Tokyo gagal di tengah jalan. Kegagalan perundingan Tokyo mendorong pemerintah Indonesia untuk kembali menerapkan Operasi Militer (OM) di Aceh tepat pada pukul 00.00 WIB, tanggal 19 Mei 2003. Operasi ini kemudian dilanjutkan dengan Operasi Sipil atau Darurat Sipil (DS) untuk

¹²¹ Ajidar Matsyah dkk, "*Pasang Surut Hubungan Aceh-Jakarta...*", hlm. 277-278.

¹²² Khairunnisa Maulida, "*Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian...*", hlm. 41.

menghilangkan keberadaan pejuang-pejuang GAM di seluruh wilayah Aceh. Namun, konflik di Aceh tidak mereda, dan jumlah korban sipil terus bertambah setiap hari. Rakyat Aceh dan pihak internasional kembali merasa kecewa dengan kegagalan perundingan di Tokyo.¹²³

Presiden Megawati memerintahkan pengiriman 40.000 pasukan khusus TNI dan 14.000 anggota Polri ke Aceh untuk menumpas GAM yang diperkirakan berjumlah 5.200 orang. Serangan dimulai pada pukul 5 pagi dengan serangan udara di wilayah Cot Keueng, Aceh Besar. Gaya serangan ini mungkin terinspirasi oleh pola serangan Amerika Serikat di Irak, yang dimulai pada waktu subuh. Serangan udara ke Aceh dengan tembakan roket dari pesawat tempur merupakan perang besar-besaran, bukan sekadar operasi militer. Penyerangan ini dianggap oleh masyarakat Aceh sebagai peristiwa yang lebih dahsyat daripada pengumuman perang dengan Belanda pada tahun 1873. Pada masa pemerintahan Megawati, Aceh mengalami serangan besar-besaran, sebuah fenomena yang sangat bertolak belakang dengan janji-janji perdamaian yang pernah diucapkan oleh Megawati setelah dilantik sebagai presiden kelima Indonesia. Masyarakat Aceh merasa kecewa dan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap Aceh, mengingat ayahnya, Soekarno, juga dianggap melakukan pengkhianatan terhadap Aceh.¹²⁴

4. Perdamaian MoU Helsinki

MoU Helsinki berhasil disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005. MoU ini berisi beberapa kesepakatan penting, yaitu:

¹²³ Ajidar Matsyah, "*Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh...*", hlm. 139.

¹²⁴ Ajidar Matsyah dkk, "*Pasang Surut Hubungan Aceh-Jakarta...*", hlm. 278.

Pertama, mengatur penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Kesepakatan ini mencakup pembuatan undang-undang pemerintah Aceh, partisipasi partai politik, dan masalah ekonomi. Dalam aspek politik, MoU ini memuat aturan mengenai pendirian partai lokal dan pengaturan perundang-undangan. Sedangkan dalam aspek ekonomi, MoU ini mengatur pembagian hasil sumber daya alam, di mana disebutkan bahwa Aceh berhak mendapat 70% dari kekayaan alam tersebut. Dalam poin kedua, disebutkan masalah Hak Asasi Manusia, yang mencakup pembentukan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Poin ketiga, MoU tersebut mengatur pemberian amnesti dan upaya reintegrasi mantan kombatan GAM dan tahanan politik ke dalam masyarakat. Termasuk dalam agenda ini adalah pelucutan senjata (*disarmament*) dan penarikan pasukan (*demobilization*). Pelucutan senjata yang dimaksud adalah pelucutan senjata yang digunakan oleh kombatan GAM, sedangkan penarikan pasukan merupakan upaya pemulangan TNI dari Aceh.

Proses perundingan Helsinki sebenarnya sudah berlangsung sebelum bencana tsunami terjadi. Terpilihnya SBY dan Jusuf Kalla secara langsung memberi legitimasi yang kuat bagi keduanya untuk mengambil langkah terobosan perdamaian Aceh. Jusuf Kalla mulai melakukan pendekatan ke GAM melalui salah satu pengusaha asal Aceh, Rusli Bintang. Langkah Jusuf Kalla lebih mantap karena sejak masih menjabat sebagai menteri di era Presiden Megawati, ia sudah mencoba membangun komunikasi dengan pihak GAM. Jusuf Kalla kemudian membentuk tim yang melibatkan Hamid Awaludin, Sofyan Abdul Djalil, dan Mayjen Syarifudin. Tim ini berkomunikasi secara informal dengan petinggi GAM, yaitu

Muzakir Manaf, Sofyan Ibrahim Tiba, dan beberapa tokoh GAM di level kabupaten.¹²⁵

c. Perspektif Kombatan GAM Terhadap Perjuangan Hasan Tiro

Dampak panjang dari kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat muncul karena masyarakat Aceh telah memberikan kontribusi signifikan kepada Indonesia namun belum mendapatkan perhatian yang sepadan. Sebagai bukti, Aceh telah memberikan bantuan berupa dua pesawat terbang saat peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-3. Pada tahun 1949, masyarakat Aceh juga memberikan sumbangan berupa uang tunai kepada angkatan perang RI serta sumbangan yang sama untuk keperluan pemerintah Sukarno. Tindakan ini menunjukkan kesediaan dan kontribusi Aceh dalam membangun Republik Indonesia. Namun, di masa Orde Baru, Aceh dianggap sebagai sumber ekonomi utama bagi pemerintah pusat tanpa mendapatkan pengakuan yang layak atau perhatian terhadap masalah kemiskinan yang melanda wilayah tersebut. Hal ini menciptakan rasa ketidakpuasan yang mendalam di antara masyarakat Aceh terhadap perlakuan pemerintah pusat.¹²⁶

Hasan Tiro dan pendukungnya sering mengacu pada kejayaan kerajaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda sebagai sumber inspirasi. Pada abad ke-17, Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling makmur di Asia Tenggara. Ini menegaskan identitas Aceh sebagai entitas yang pernah mandiri,

¹²⁵ Mudjiharto, "Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan Mou Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Aceh", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 8, No. 1, 2020, hlm. 101-102.

¹²⁶ Hany Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh...", hlm. 97.

kuat, dan berdaulat.¹²⁷ Aceh memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang berdaulat dan merdeka sebelum menjadi bagian dari Indonesia. Dengan demikian, Hasan Tiro mengatakan bahwa Aceh memiliki hak untuk memperjuangkan kemerdekaannya berdasarkan sejarah panjang tersebut. Pandangan ini menjadi dasar ideologis bagi perjuangan GAM untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara yang berdaulat dan merdeka di Aceh.¹²⁸

Cara Hasan Tiro untuk memobilisasi masyarakat Aceh adalah hal yang pertama dilakukan memperkenalkan sejarah Aceh, bangsa sendiri, berdiri sendiri, bahasa sendiri, pakaian sendiri, makanan sendiri, karna mempunyai identitas keacehan. Selain itu hal yang penting adalah jangan *inferiority complex* yaitu jangan merasa merendahkan diri dari Jawa. Jadi salah satu cara Hasan Tiro membangkitkan identitas keacehan dan mengingatkan bahwa orang aceh ini sama sebahu dengan orang inggris, prancis dan eropa lainnya. Ini adalah salah satu penyebab masyarakat Aceh tertarik dengan ideologi yang di kembangkan oleh Hasan Tiro, sebelum itu, ia memperkenalkan sejarah melalui dakwah tidak ada perang senjata, tapi dihadapi dengan represif oleh pemerintah Suharto dan terjadi kekerasan sehingga menimbulkan perlawanan untuk mempertahankan diri.¹²⁹

Landasan perjuangan Hasan Tiro untuk kemerdekaan Aceh adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Sejak dulu, Aceh telah banyak membantu Indonesia, tetapi setelah Indonesia merdeka, Aceh seolah-olah diabaikan

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman (75 Tahun), Tokoh Masyarakat Tiro, Pada tanggal 18 Mei 2024.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Tgk Harun (63 Tahun), Pasukan GAM Eks Libya, Pada tanggal 26 Juni 2024.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

atau bahkan dijajah. Meskipun bumi Aceh kaya akan sumber daya alam, masyarakat Aceh tidak menikmati kekayaan alam yang ada di tanah mereka sendiri dan tetap hidup dalam kondisi yang tidak sejahtera. Ketidakadilan inilah yang menjadi dasar utama bagi Hasan Tiro untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh.¹³⁰ Hasan Tiro rela meninggalkan kenyamanan hidup di Amerika, termasuk istri dan anaknya yang masih kecil, untuk kembali ke Aceh dan memimpin perjuangan ini. Pengorbanan dan dedikasinya menunjukkan betapa kuatnya komitmen Hasan Tiro terhadap cita-cita kemerdekaan Aceh. Zakaria Saman menjelaskan bahwa tujuan utama Hasan Tiro dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah mendirikan Aceh sebagai negara yang berdaulat dan terlepas dari Indonesia.¹³¹

Tuduhan bahwa Hasan Tiro mendukung perjuangan Aceh hanya karena tidak mendapatkan tender PT Arun adalah tidak benar. Hasan Tiro telah memperjuangkan Aceh jauh sebelum PT Arun ditemukan, ketika Hasan Tiro tinggal di New York bekerja sebagai perwakilan Indonesia, terjadi tragedi Pulot Cot Jeumpa, pembantaian warga oleh tentara di Gampong Pulot Cot Jeumpa, kecamatan Leupung, Aceh Besar. Tragedi ini menjadi puncak kemarahan Hasan Tiro, yang kemudian memprotes dengan mengirim surat yang sangat keras kepada Ali Sastroamijoyo, Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Jadi, perjuangan Hasan Tiro tidak ada hubungannya

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bahktiar Abdullah (46 Tahun), Panglima Sagoe/kepala KPA Pidie periode 2017-2022, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Zakaria Saman (78 Tahun), Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, Pada tanggal 22 Juni 2024.

dengan PT Arun, karena ia sudah memperjuangkan Aceh jauh sebelum PT Arun ditemukan.¹³²

Tindakan GAM tidak bisa disebut sebagai pemberontakan, karena yang dilakukan oleh Hasan Tiro adalah upaya untuk menegakkan kembali kedaulatan Aceh. Ini berbeda dengan pemberontakan, karena jika Indonesia berdiri pada tahun 1500 dan Aceh memberontak, itu bisa dianggap sebagai pemberontakan. Namun, Aceh telah merdeka selama bertahun-tahun sebelum tiba-tiba bergabung dengan Indonesia pada tahun 1945. Indonesia adalah negara yang baru lahir, sedangkan Aceh sudah berdiri jauh lebih lama. Jadi, tindakan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pemberontakan. Pada masa itu, Kerajaan Aceh adalah kerajaan besar dan berdaulat, yang bekerja sama dengan Kesultanan Utsmaniyah (Turki Usmani) dan negara-negara lain. Aceh bahkan dianggap sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara, setara dengan Inggris, Portugal, dan Spanyol. Aceh adalah negara lama yang sudah lama berdiri, sementara Indonesia belum ada pada masa itu, yang ada hanya terdiri dari kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya. Oleh karena itu, menurut Munawar Liza, tidak ada istilah pemberontakan untuk Aceh pada masa itu. Landasan dari perjuangan Hasan Tiro adalah karena *illegal transfer osafarity* atau transfer kedaulatan yang ilegal yang dilakukan oleh belanda kepada indonesia. Sehingga membuat Hasan Tiro memprotes dengan membangkitkan kembali

¹³² Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

kemerdekaan Aceh dengan tujuan meneruskan kerajaan yang lama (*successor state*).¹³³

Pemikiran Hasan Tiro telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pertama-tama, ia mendorong bangkitnya nasionalisme dikalangan orang Aceh. Pemikiran dan retorika Hasan Tiro menyoroti sejarah Aceh sebagai sebuah negara berdaulat yang eksis jauh sebelum pembentukan Indonesia.¹³⁴ Selain itu, Hasan Tiro menekankan bahwa Aceh pernah memiliki kekuasaan yang luas, mencakup hampir seluruh Sumatera dan wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Malaysia. Argumennya menegaskan bahwa kekuasaan yang sebesar itu tidak pantas dijadikan hanya sebuah daerah di dalam suatu negara lain.

Dengan demikian, pemikiran ini memperkuat kesadaran akan identitas nasional Aceh yang independen. Pemikiran Hasan Tiro juga memicu penentangan terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Orang Aceh merasa bahwa pemikiran dan tindakan Hasan Tiro sesuai dengan realitas dan kondisi yang ada di Aceh. Mereka merasa bahwa Jakarta telah mengkhianati potensi alam dan kekhasan budaya Aceh dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Hal ini memperkuat dukungan terhadap gerakan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar bagi Aceh. Secara keseluruhan, pemikiran Hasan Muhammad di Tiro telah memberikan landasan bagi gerakan nasionalisme Aceh serta memperkuat perlawanan terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Dengan menyoroti sejarah dan identitas Aceh yang

¹³³ Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

¹³⁴ Monika Sari, "Hasan Tiro: History of Aceh...", hlm. 33.

independen, pemikiran ini memengaruhi pandangan masyarakat Aceh terhadap posisi politik dan kebudayaannya dalam konteks Indonesia yang lebih luas.¹³⁵

Berdasarkan perspektif kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di wilayah Pidie, dapat di analisis bahwa perjuangan Hasan Tiro dikarenakan transfer kedaulatan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia sebagai tindakan ilegal. Ini menjadi dasar bagi Hasan Tiro untuk memprotes dan membangkitkan kembali kemerdekaan Aceh, dengan tujuan untuk mengembalikan kedaulatan dan meneruskan kerajaan lama (*successor state*). Selain itu, pelanggaran HAM dan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh menjadi pemicu kemarahan Hasan Tiro dan pengikutnya sehingga menyatakan perlawanan terhadap RI yang dilangsungkan di gunung Halimun, Pidie.

Dengan dasar ini, Hasan Tiro berupaya mengembalikan kedaulatan Aceh yang menurutnya telah hilang secara tidak sah ketika Aceh dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Selain itu, Hasan Tiro berjuang untuk mewujudkan negara bersambung (*successor state*) dari kerajaan Aceh tempo dulu. Tujuan ini didasarkan pada sejarah Aceh sebagai kerajaan yang pernah diakui di dunia internasional. Hasan Tiro ingin mengembalikan kejayaan Aceh sebagai entitas politik yang merdeka dan berdaulat, dengan landasan pada identitas dan sejarah panjang Aceh sebagai kerajaan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

¹³⁵ Monika Sari, "Hasan Tiro: History of Aceh....", hlm. 33-34.

BAB V

PENUTUP

5,1 Kesimpulan

Hasan Muhammad Tiro lahir pada 25 September 1925 di Tanjong Bungong, Lamlo, Pidie, Aceh, ia adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Aceh. Ayahnya, Leube Muhammad, adalah seorang qadhi terkenal, dan ibunya Pocut Fatimah memiliki garis keturunan langsung dari Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, seorang pejuang kemerdekaan Aceh. Meskipun hubungan Hasan Tiro dengan Teungku Chik di Tiro berasal dari garis ibu, ia tetap diakui sebagai cucu dari tokoh besar tersebut.

Adapun landasan dari perjuangan Hasan Tiro adalah *illegal transfer osafarity* atau transfer kedaulatan yang ilegal yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Hasan Tiro memprotes dengan membangkitkan kembali kemerdekaan Aceh dengan tujuan meneruskan kerajaan yang lama (*successor state*) sebagai satu Kerajaan yang pernah ada dalam catatan sejarah negara-negara di dunia. Hasan Tiro menginginkan Aceh sebagai negara yang berdaulat dan pisah dari Indonesia, Hasan Tiro ingin mengembalikan kejayaan Aceh sebagai entitas politik yang merdeka dan berdaulat, dengan landasan pada identitas dan sejarah panjang Aceh sebagai kerajaan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan perspektif kombatan GAM di wilayah Pidie adalah Perjuangan Hasan Tiro untuk kemerdekaan Aceh didorong oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh setelah bergabung dengan Indonesia. Meskipun Aceh kaya akan sumber daya alam, rakyatnya tidak menikmati kesejahteraan, dan Aceh seolah-olah diabaikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perjuangan Hasan Tiro

tidak dianggap sebagai pemberontakan, tetapi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan Aceh. Pemikiran Hasan Tiro juga memicu kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Aceh dan perlawanan terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Hasan Tiro berupaya mengembalikan kejayaan Aceh sebagai negara yang berdaulat, dengan landasan pada sejarah panjang Aceh sebagai kerajaan yang berpengaruh di Asia Tenggara.

5.2 Saran

Terkait dengan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk penulisan ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun, agar penulisan ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

1. Saran untuk pengembangan studi lanjutan

Penelitian ini hanya mengupas sebagian dari sejarah perjuangan Hasan Tiro dan pengaruhnya terhadap Aceh. penulis menyarankan untuk studi lanjutan dapat difokuskan pada analisis mendalam tentang pengaruh ideologi Hasan Tiro dalam membentuk identitas politik modern Aceh, serta bagaimana gagasan-gagasannya mempengaruhi kebijakan otonomi daerah setelah perjanjian damai Helsinki.

2. Saran bagi pemerintah

Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengambil pelajaran dari perjuangan Hasan Tiro dalam merumuskan kebijakan yang lebih sensitif terhadap identitas lokal dan aspirasi otonomi. Hal ini penting untuk menjaga

integrasi nasional tanpa mengabaikan keragaman budaya dan sejarah di Indonesia.

3. Saran bagi masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh, khususnya generasi muda, disarankan untuk mempelajari dan memahami sejarah perjuangan Hasan Tiro secara mendalam. Ini penting untuk menjaga kesadaran akan identitas budaya dan sejarah Aceh, serta untuk menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh para tokoh perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi rakyat Aceh.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Andriyani, S. (2017). “Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh”, *Jurnal ISIP, Januari* .
- Arisandi, H. (2015). *Pemikiran tokoh-tokoh Sosiologi dari klasik sampai modern*. Yogyakarta: Ircisod.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Tiro/Truseb, K. T. (2020). *Kecamatan Tiro/Truseb Dalam Angka 2021, (Badan Pusat Statistik)*. pidie.
- BP, A. R. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Vol. 2, No. 1, Juni* .
- Damanik, A. T. (2010). *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI).
- Dodi, L. (2017). "Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik". *Jurnal Al-'Adl, Vol. 10, No. 1, Januari*
- Evan A. Laksmana, “. S.-m.-S. (2013). “Containing Spoilers: Civil-military relations and third parties in the post-Suharto Aceh peace initiatives” . *Paper Asia Security Initiative Policy, Series no. 25, September*.
- Fajarwati. (2021). *Konsep Politik Hasan Tiro Dalam Melihat Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Gunawan Santoso, N. K. (2023). “Filsafat Konten Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan Untuk Generasi Z Bangsa Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol. 02 No. 02, Juni*.
- Hadi, A. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Haryanto, S. (2017). “Pendekatan Historis Dalam Studi Islam”. *Jurnal Ilmiah Studi Islam, Vol 17, No 1, Desember*.
- Ikkal Husni, “. d. (2020). “Aceh dan Perdamaian”. *Jurnal Proceedings of International Conference on Islamic Studies “Islam & Sustainable Development”, Vol. 3, No. 1, Februari* .
- Ilhamsyah, F. (2018). “Gagasan Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh”. *Jurnal Public Policy, Vol.4, No.1 April 2018,*.

- Iqbar. (2016). "Trees Vegetation Diversity In Pt Arun Nglhousing, Lhokseumawe, Aceh Province". *Jurnal Natural*, Vol.16, No.1.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Jayanti, K. (2013). "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005". *Jurnal Al-Turās*, Vol. XIX No. 1, Januari .
- Krasner, S. D. (2001.). "Rethinking the sovereign state model",. *Review of International Studies*, Vol. 27, No. 17.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah* . Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laksmiana, E. A. (2013). "Containing Spoilers: Civil-military relations and third parties in the post-Suharto Aceh peace initiatives" . *Paper Asia Security Initiative Policy*, Series no. 25, September.
- Liliweri, A. (2011). *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matsyah, A. (2023). *Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar'iyah)*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Mochammad Afroni "Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam", J. M. (2019). "Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam". *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9, No. 2.
- Muchsin, M. A. (2007). *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*. Banda Aceh: Ar-Raniry; Press.
- Mudjiharto. (2020). "Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 Dan Mou Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Aceh". *Jurnal Politik Profetik*, Volume 8, No. 1.
- Muhajir, A. (2021). "Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan DI/TII Aceh" ., *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*.
- Muhammad Insany Rachman, E. D. (2013). "Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional". *Jurnal Jendela Hukum*, ISSN Cetak & Online: 2355-5831/ 2355-9934,.
- Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S. (1996). *Metode Naturalistik Kuantitatif*. Bandung:: Tarsinto.
- Novialdi, R. (2017). "Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki Catatan atas Tahap Penjajakan (Trust Building) Hingga Pencapaian Kesepakatan Damai (MoU)". *Jurnal Culture, Economy, and Sosial Changes*, 1 Januari .

- Nuradhawati, R. (2019). "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia". *Jurnal Academia Praja, Vol. 2, No. 1, Februari*.
- Nurhayati. (2016). "Penulisan Sejarah (Historiografy): mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Vol. 1, No.1, Jan-Des*.
- Nurpratiwi, H. (2019). "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh", *Jurnal Jambura History and Culture". Volume 1 issue 2, Juli* .
- Pane, N. S. (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka Solusi, Harapan, dan Impian*. Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI.
- Pratiwi, E. A. (2020). "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)". *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, p-issn:2620-4789*.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: : Prestasi Pustaka.
- Rasid, A. (2018). "Implikasi Landasan-Landasan Pendidikan: The Implication of Educational Foundations". *Jurnal Al-Fikrah, Vol. 1 No. 1, Juni* .
- Rira Nuradhawati, ". S. (2019). "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia". *Jurnal Academia Praja, Vol. 2, No. 1, Februari* .
- RPJM Gampong Mns. Mancang, (2016). *Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie Tahun 2016-2021*.
- Sari, M. (2022). "Hasan Tiro: History of Aceh as The Foundation of Ideology Independent Aceh". *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol 7, No 1*.
- Sisin Warini, F. P. (2023). "Implikasi Landasan Historis Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Modern". *Jurnal El-Rusyd, Vol. 8 No. 1*.
- Situngkir, D. A. (2018). "Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional". *Jurnal Lex Librum, Vol. 4, No. 2, Juni*.
- Soegijono. (1993). "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data". *Artikel Media Litbangkes, Vol. 3, No. 01,*.
- Soekarno, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar,*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teungku Hasan M. di Tiro, A. d. (2020). *Aceh di Mata Dunia*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Tiro, H. M. (1999). *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: Teplok Press.

Tiro, T. H. (1984). *The Price of Freedoms*. Aceh Sumatra: National Liberation Front of Aceh Sumatra.

Widagdho, D. (2004). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wirawan. (2012). *Teori-Teori social dalam tiga paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yus, A. M. (2020). "Pemikiran Dan Tindakan Politik Hasan Tiro", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 54, Mei .

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Munawar Liza Zainal (50 Tahun), Anggota AM/Tim Perundingan di Helsinki, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman (75 Tahun), Tokoh Masyarakat Tiro, Pada tanggal 18 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Zakaria Saman (78 Tahun), Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, Pada tanggal 22 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Tgk Harun (63 Tahun), Pasukan Eks Libya GAM, Pada tanggal 26 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Bahktiar Abdullah (46 Tahun), Panglima Sagoe/ketua KPA Pidie periode 2017-2022, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

Sumber Internet

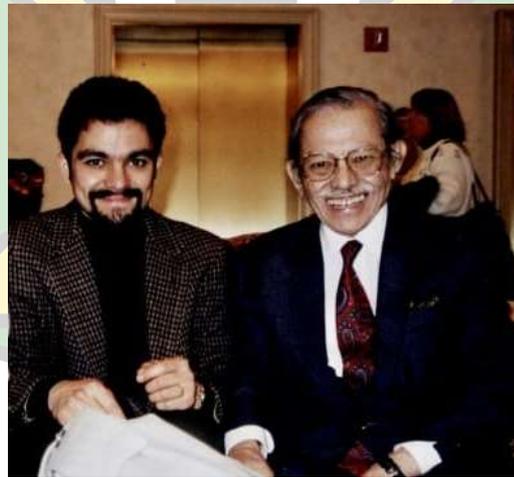
Dinata, M. P. (2020). *Lhokseumawe Disebut Sebagai Kota Petro Dollar*. Diambil [kembali dari www.djkn.kemenkeu.go.id:https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/13368/](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/13368/)

Lampiran 1

FOTO-FOTO TGK. M. HASAN DI TIRO



Gambar 1.1
Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, M.S., M.A.,LL.D., Ph.D.



Gambar 1.2
Tgk Hasan Tiro 86ersama Karim Tiro Foto: Suparta



Gambar 1.3

Tgk Hasan Tiro saat pulang ke Aceh, 1969. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi



Gambar 1.4

Tgk Hasan Tiro di Swedia. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi



Gambar 1.5

Dalam sebuah upacara Milad GAM. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi



Gambar 1.6
Seusai Deklarasi Aceh Merdeka di Pidie. Foto
repro: Suparta dari dokumen pribadi



Gambar 1.7
Kegiatan di Maktabah Tazzura, Libya. Foto
repro: Suparta dari dokumen pribadi



Gambar 1.8
Tgk Hasan Tiro bersama rekan-rekannya. Foto
repro: Suparta dari dokumen pribadi



Gambar 1.9

Tgk Hasan Tiro saat pulang ke Aceh usai konflik, 11 Oktober 2008. Foto: Suparta



Gambar 1.10

Tgk Hasan Tiro dan Tgk Amir Maumud (duduk) saat pulang ke Aceh. Foto: Suparta



Gambar 1.11

Tgk Hasan Tiro wafat 3 Juni 2010, jenazahnya disalatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Foto: Suparta

Lampiran 2

FOTO KONDISI SEKARANG GUNUNG HALIMUN DI PIDIE



Gambar 2.1
Pemandangan Terkini gunung Halimun di Pidie
(foto aceHTrend:Taufik)



Lampiran 3

**STRUKTUR GAM PERIODE AWAL DAN PERIODE PARTAI ACEH
SEKARANG**

a. Struktur Periode Awal



ACHEH-SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT
(ATJÉH MEURDÉHKA)



Kabinet pertama GAM dinamakan sebagai Kabinet Negara Aceh Sumatera, yang disusun pada 24 Mei 1977 dengan susunan sebagai berikut:

- Dewan Syura:
 - Tgk. H. Ilyas Leube
 - Tgk. H. Ilyas Cot Plieng
 - Tgk. Hasbi Geudong
 - Tgk. Ayah Sabi
- **Wali Negara: Dr. Tengku Hasan di Tiro, LL.D**
- **Wakil Wali Negara: Dr. Tgk. Mughtar Yahya Hasbi Geudong**
- Menteri Dalam Negeri: Dr. Tgk. Mughtar Yahya Hasbi Geudong
- Menteri Luar Negeri: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
- Wakil Menteri Luar Negeri: Dr. Tgk. Mughtar Yahya Hasbi Geudong
- Menteri Pertahanan: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
- Wakil Menteri Pertahanan: Dr. Tgk. Mughtar Yahya Hasbi Geudong
- Menteri Kehakiman: Teungku Ilyas Leubee
- Menteri Sosial: dr. Zubir Mahmud
- Menteri Kesehatan: dr. Zaini Abdullah
- Menteri Penerangan: Teungku Muhammad Taher Husen
- Menteri Perhubungan: Teungku Amir Ishak, SH
- Menteri Pendidikan: Dr. Husaini M. Hasan
- Menteri Perdagangan: Teungku Amir Mahmud (Singapura)
- Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Asnawi Ali
- Menteri Keuangan: Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe
- Menteri Sekretaris Negara: Teungku Fauzi Hasbi Geudong

- Kepala Staf Angkatan Bersenjata: Teungku Darul Kamal
- Kepala Pengawas Keuangan Negara: Teungku Uzir Jailani
- Duta Kuasa Penuh: Malik Mahmud (Singapura)
- Panglima Pengawal Wali Negara: Teungku Daud Husein
- Gubernur Pase: Teungku Hasbi Geudong
- Gubernur Pidie: Teungku Ilyas Cot Plieng
- Gubernur Batee Ilek: Teungku Abdul Aziz
- Gubernur Perlak: dr. Zubir Mahmud
- Gubernur Teming: Teungku Ali Daud
- Gubernur Linge: Teungku Ilyas Leube

b. Sruktur Periode Partai Aceh Sekarang



REKAM DAFTAR PARTAI	
PARTAI ACEH	
REKAM DAFTAR PARTAI	
REKAM DAFTAR PARTAI	
1. NAMA	TEUNGKU DARUL KAMAL
2. JENJANG	KEPALA STAF ANGKATAN BERSENJATA
3. JENJANG	KEPALA PENGAWAS KEUANGAN NEGARA
4. JENJANG	DUTA KUASA PENUH
5. JENJANG	PANGILMA PENGAWAL WALI NEGARA
6. JENJANG	GUBERNUR PASE
7. JENJANG	GUBERNUR PIDIE
8. JENJANG	GUBERNUR BATEE ILEK
9. JENJANG	GUBERNUR PERLAK
10. JENJANG	GUBERNUR TEMING
11. JENJANG	GUBERNUR LINGE
12. JENJANG	...
13. JENJANG	...
14. JENJANG	...
15. JENJANG	...
16. JENJANG	...
17. JENJANG	...
18. JENJANG	...
19. JENJANG	...
20. JENJANG	...
21. JENJANG	...
22. JENJANG	...
23. JENJANG	...
24. JENJANG	...
25. JENJANG	...
26. JENJANG	...
27. JENJANG	...
28. JENJANG	...
29. JENJANG	...
30. JENJANG	...
31. JENJANG	...
32. JENJANG	...
33. JENJANG	...
34. JENJANG	...
35. JENJANG	...
36. JENJANG	...
37. JENJANG	...
38. JENJANG	...
39. JENJANG	...
40. JENJANG	...
41. JENJANG	...
42. JENJANG	...
43. JENJANG	...
44. JENJANG	...
45. JENJANG	...
46. JENJANG	...
47. JENJANG	...
48. JENJANG	...
49. JENJANG	...
50. JENJANG	...
51. JENJANG	...
52. JENJANG	...
53. JENJANG	...
54. JENJANG	...
55. JENJANG	...
56. JENJANG	...
57. JENJANG	...
58. JENJANG	...
59. JENJANG	...
60. JENJANG	...
61. JENJANG	...
62. JENJANG	...
63. JENJANG	...
64. JENJANG	...
65. JENJANG	...
66. JENJANG	...
67. JENJANG	...
68. JENJANG	...
69. JENJANG	...
70. JENJANG	...
71. JENJANG	...
72. JENJANG	...
73. JENJANG	...
74. JENJANG	...
75. JENJANG	...
76. JENJANG	...
77. JENJANG	...
78. JENJANG	...
79. JENJANG	...
80. JENJANG	...
81. JENJANG	...
82. JENJANG	...
83. JENJANG	...
84. JENJANG	...
85. JENJANG	...
86. JENJANG	...
87. JENJANG	...
88. JENJANG	...
89. JENJANG	...
90. JENJANG	...
91. JENJANG	...
92. JENJANG	...
93. JENJANG	...
94. JENJANG	...
95. JENJANG	...
96. JENJANG	...
97. JENJANG	...
98. JENJANG	...
99. JENJANG	...
100. JENJANG	...

Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Biografi Singkat Muhammad Hasan di Tiro?

1. Siapa Hasan Tiro?
2. Bagaimana latar belakang keluarga Hasan Tiro?
3. Bagaimana riwayat pendidikan Hasan Tiro?
4. bagaimana silsilah singkat Hasan Tiro?
5. Apa saja kontribusi atau warisan paling penting yang ditinggalkan oleh Hasan Tiro?

2. Apa Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh?

1. Bagaimana kondisi politik pada masa Hasan Tiro?
2. Bagaimana cara Hasan Tiro memobilisasi masyarakat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Aceh?
3. Apa saja peran Hasan Tiro dalam pergerakan kemerdekaan Aceh?
4. Apakah ada pengakuan atau tanggapan internasional terhadap perjuangan Hasan Tiro?
5. Apa yang mendasari perjuangan Hasan Tiro di Aceh?

3. Bagaimana Perspektif Kombatan GAM Wilayah Pidie Terhadap Landasan Historis Perjuangan Hasan Tiro di Aceh?

1. Kapan Bapak bergabung dengan GAM dan mengapa alasan apak ingin bergabung dengan GAM?
2. Apa peran Bapak pada gerakan Aceh merdeka?
3. Bagaimana cara Tgk Hasan Tiro mengirim pasukan GAM ke Libya, melalui jalur apa?
4. Bagaimana cara Hasan Tiro merekrut dan mengorganisir anggota GAM?
5. Bagaimana tanggapan bapak terhadap landasan historis dalam perjuangan Hasan Tiro di Aceh?

Lampiran 5

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	UMUR	JABATAN
1.	Zakaria Saman	78 Tahun	Menteri Pertahanan GAM
2.	Munawar Liza Zainal	50 Tahun	Tim Perundingan di Helsinki dan Pejuang GAM
3.	Tgk. Harun	63 Tahun	Pasukan GAM Eks Libya
4.	Bahktiar Abdullah	46 Tahun	GAM Panglima Sagoe
5.	Abdullah Usman	75 Tahun	Tokoh Masyarakat di Tiro



Lampiran 6

DOKUMENTASI PENULIS DENGAN INFORMAN



Gambar 3.1
Wawancara dengan Bapak Zakaria Saman.
Selaku Menteri Pertahanan GAM.



Gambar 3.2
Wawancara dengan Tgk Harun.
Selaku Pasukan Eks Libya GAM



Gambar 3.3
Wawancara dengan Bapak Munawar Liza Zainal.
Selaku Tim Perundingan di Helsinki
dan Pejuang Gerakan Aceh Merdeka



Gambar 3.4
Wawancara dengan Bapak Bahktiar Abdullah.
Selaku Ketua KPA Pidie dan Panglima Sagoe GAM



Gambar 3.5
Wawancara dengan Tgk Abdullah Usman.
Selaku Tokoh Masyarakat di Tiro

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 7

DOKUMENTASI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI



Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

6. Identitas:

Nama : Bayu Setiawan
Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Bubee, 07 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : Cadek, Kajhu

7. Nama Orang Tua:

a. Ayah : M. Syafi'i
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Agama : Islam
Alamat : Madura, Jawa Timur
b. Ibu : Azizah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Pulo Bubee, kec. Pidie. Kab. Pidie

8. Riwayat Pendidikan:

	Tahun
Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Peukan Pidie	(2014)
STLP : SMP Negeri 1 Sigli	(2017)
SLTPA : SMK Negeri 1 Sigli	(2020)
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Adab dan Humaniora, Angkatan	(2024)

AR - RANIRY